



**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang  
Periode 2013-2015**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi  
Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Sebagai Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi*

**Oleh**

**MIFTAHUL RIZKA  
NIM 12 231 009**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2017**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Rizka  
NIM : 12 231 009  
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Tuo, 02 September 1994  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PERIODE 2013-2015** kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2017  
Saya yang Menyatakan



Miftahul Rizka  
NIM. 12 231 009

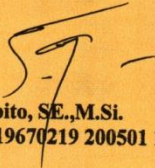
**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

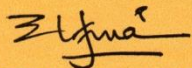
Pembimbing skripsi atas nama MIFTAHUL RIZKA, NIM. 12 231 009 dengan judul: "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PERIODE 2013-2015" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan pada Sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I


Batusangkar, Januari 2017  
Pembimbing II

  
Gampito, SE., M.Si.  
NIP. 19670219 200501 1 005

  
Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA.  
NIP. 19740623 200003 2 002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar







  
Nasfizar Guspendri, SE., M.Si.  
NIP. 19750823 200312 1 004

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang telah ditulis oleh MIFTAHUL RIZKA NIM 12 231 009 berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Periode 2013-2015" telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 dan dinyatakan telah tepat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

| No | Nama Penguji  | Jabatan           | Tanda Tangan   | Tanggal  |
|----|---|-------------------|--|----------|
| 1  | Gampito, SE., M.Si. /<br>NIP. 19670219 200501 1 005                 | Ketua Sidang      |    | 6/3-17   |
| 2  | Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA. /<br>NIP. 19740623 200003 2 002 | Sekretaris Sidang |   | 6/3 2017 |
| 3  | Nasfizar Guspendri, SE., M.Si. /<br>NIP. 19750823 200312 1 004      | Anggota I         |  | 6/3/17   |
| 4  | Sri Adella Fitri, SE., M.Si. /<br>NIP. 19830713 200604 2 002        | Anggota II        |  | 6/3/2017 |

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar



Nasfizar Guspendri, SE., M.Si.  
NIP. 19750823 200312 1 004

## MOTTO

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain  
(Qs. Al-Insyirah: 7-8)*

*"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru  
bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka  
menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.  
Mereka tidak menyia-nyatakan waktu untuk menunggu inspirasi"  
(Ernest Newman)*

*"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia adalah  
penakut dan bimbang.  
Teman yang paling setia,  
Hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh"*

*Saya datang, saya belajar, saya  
bimbingan, saya ujian, saya gagal, saya  
revisi dan akhirnya saya menang*



## PERSEMBAHAN

*“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal”.*  
(Q.S. Al-Baqarah: 269)

***Alhamdulillah... Alhamdulillah ... Alhamdulillahirabbil'alamin...***

*Sujud syukur kusembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha segalanya. Terimakasih ya Allah atas waktu yang telah kujalani yang sudah menjadi takdirku, susah, sedih, bahagia dan bertemu dengan orang-orang yang member pengalaman dan warna-warni dalam kehidupanku, Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awalku bagi untuk meraih cita-cita besarku.*

### ***Ku Persembahkan Karya Kecil ini Untuk***

#### ***Ayah dan Ibu tercinta***

Ayah dan Ibu adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Meskipun ayah sudah tidak bersama kami lagi, tetapi ayah tetap memberikan semangat kepada kha. Terima kasih untuk IBU yang telah membesarkan dan mendidik kha dengan penuh kasih sayang. Yang tiada pernah mengeluh akan sikap dan tingkah laku kha yang kadang membuat IBU marah. Yang tiada pernah marah saat kha mengalami kegagalan dalam menyelesaikan karya kecil ini. Selalu memberi semangat ketika ikha jatuh dan terpuruk dalam menyelesaikan masa pendidikan ini.



Terima kasih IBU atas pengorbanan, nasihat, dan do'a yang tiada henti kalian selama ini sehingga kha bisa menyelesaikan pendidikan dan mencapai tujuan akhir dari pendidikan ini, menjadi seorang Sarjana Ekonomi.

#### ***My Brother's (Fauzi Aulia Rahman)***



*Untuk adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama uji, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan uji selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat kha persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi kha akan selalu menjadi yang terbaik untuk uji ... Semangat untuk uji agar dapat menyelesaikan pendidikannya, semoga semua yang sama-sama kita cita-citakan tercapai, amiiiiin*

**Buat My Big Family Mamak, Etek, dan Sepupu-sepupu yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam melanjutkan sekolah kha sampai kuliah sehingga menjadi Sarjana Ekonomi.**

### *Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Skripsi kha...*

*Bapak Gampito SE., M.Si dan Ibu Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA selaku dosen pembimbing skripsi kha,*

*Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si dan Ibu Sri Adella Fitri, SE., M.Si selaku dosen penguji skripsi kha..*



*terima kasih banyak pak..bu.,*

*kha sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, kha tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak dan ibu.*

### *My Best Friend's (Inces-Inces Kece)*

*Buat Inces-Inces Suci, Desi, Ithi, Ifha, Ay, Mayor, Fidia, Cuppy dan Kk Cugit. Terimakasih atas persahabatan yang kalian kasih*

*selama 4,5 tahun kita menimba ilmu di kampus ini. Kita yang sama-sama*



*saling memberi semangat dalam belajar, waktu yang tidak pernah cukup untuk kita berbagi cerita karena kesibukan masing masing, tapi kita selalu memiliki waktu untuk mendengarkan keluh kesah antara kita baik itu masalah teman, cinta dan keluarga, Dan selamanya kita tetap SAHABAT.*



*Buat Cuppy dan KK Cugit, Walaupun kita tidak sama-sama menyelesaikan pendidikan ini tapi kalian harus tetap semangat ya buat wisuda bulan September "Fighting Inces".*

### *Buat Keluarga Besar Aksya A<sup>12</sup> dan Aksya B<sup>12</sup>*

4,5 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk kita menyelesaikan pendidikan ini teman. Terimakasih atas perkenalan dan waktu yang kita lalui selama 4,5 tahun terakhir ini.

Spesial For Aksya A Lover's Afdal, Surit, Boik, Ade, Cipeb, Ay, Ifha, Ithi, Suci Jewel, Suci W, Yati, Indah, Cuppy, Desi, Ipit, Fika, One, Fera, Zola, Ayu, Fidia, Eji, Atik, Ainul, Zizi, Yesi, Idar, dan Riri. Teman-Teman Aksya A yang sudah kasih semangat untuk kha. Semangat Untuk teman-teman yang akan menyelesaikan skripsinya untuk wisuda bulan september.

Dan Terimakasih juga untuk sanak kha Uciee Nur yg telah memberi semangat dan menolong kekurangan dalam skripsi kha. Semoga Cepat nyusul Bulan Maret tahun depan, Amin..

Dan Terimakasih juga untuk Adik-Adik Ekonomi Syariah Depitok, Ayi, Vivil, Icin, Yona, Vivi A, Tika, Wulan, Wilma, Sabrita, dan Uum.

### *Kawan-Kawan KKN*

Buat Teman-teman Satu lokasi KKN Di Jorong Simarasok, Nagari Simarasok, Kecamatan Baso. Makasih buat perkenalannya Ari, Aya, Ayu, Lusi, Lisa, Yeni, Welda, Dewi, dan Elfi.



### *Spesial Buat Seseorang*

Terima kasih teruntuk Kakanda Adriyan Novrianto atas semua perhatian dan supportnya selama kha menyelesaikan skripsi ini. Selalu mengajarkan kha untuk selalu sabar saat kha panik dan tergesa-gesa menyelesaikan skripsi ini. Memberi semangat saat kha mengalami kegagalan dan meyakinkan kha kalau kha bisa menyelesaikan skripsi ini

Salam Penulis Miftahul Rizka SE



## ABSTRAK

**Miftahul Rizka, NIM 12 231 009**, judul skripsi “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Periode 2013-2015**”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Padang Panjang yang diuji dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Padang Panjang. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Padang Panjang periode 2013-2015.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran terhadap data-data keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang penulis teliti kemudian penulis mengolahnya untuk bisa memberikan hasil analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan kinerja keuangan anggaran belanja. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berasal dari DPPKAD Kota Padang Panjang.

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan menunjukkan analisis kinerja keuangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien.

Sedangkan untuk analisis kinerja keuangan belanja daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.

**Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji, Kehormatan, Keagungan, Kemuliaan hanya milik Allah SWT yang telah mencurahkan Taufik, Hidayah, Rahman dan Rahim-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PERIODE 2013-2015”**. Shalawat dan Salam penulis memohon kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ayahanda (Wirman), Ibunda (Yarnelis), dan adikku (Fauzi Aulia Rahman) yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan ini. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Batusangkar yaitu Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Penguji I yaitu Bapak Nasfizar Guspendri, S.E., M.Si yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Pembimbing I Bapak Gampito, S.E., M.Si, yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi.
4. Pembimbing II yaitu Ibu Elfina Yenti, SE. M.Si.,Akt.,CA yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi.
5. Penguji II yaitu Ibu Sri Adella Fitri, SE., M.Si yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Penasehat Akademik Bapak Dr. Rizal, M.Ag yang telah memberikan nasehat dan dukungannya dari awal sampai akhir perjuangan saya di IAIN Batusangkar.
7. Seluruh dosen dan staff administrasi IAIN Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan IAIN Batusangkar, yang telah menyediakan fasilitas berupa buku-buku dan internet yang penulis butuhkan.
9. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
10. Pegawai DPPKAD khususnya bagian akuntansi yang telah memberi fasilitas dan arahan serta masukan selama penelitian.

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain iringan doa dan harapan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati serta menjadi amal sholeh bagi Penulis. Amin...

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat Penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 28 Februari 2017  
Penulis,

**MIFTAHUL RIZKA**  
**NIM. 12 231 009**

## DAFTAR ISI

|  | <b>Hal</b> |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                         |            |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>                   |            |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>                |            |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>                |            |
| <b>KATA PERSEMBAHAN</b>                      |            |
| <b>ABSTRAK</b> .....                         | i          |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                  | ii         |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                      | iv         |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                    | vi         |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                   | vii        |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                 | viii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                     |            |
| A. Latar Belakang .....                      | 1          |
| B. Identifikasi Masalah .....                | 7          |
| C. Batasan Masalah .....                     | 7          |
| D. Rumusan Masalah .....                     | 7          |
| E. Tujuan Penelitian.....                    | 7          |
| F. Manfaat Penelitian .....                  | 8          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                 |            |
| A. Keuangan Daerah .....                     | 9          |
| 1. Pengertian Keuangan Daerah .....          | 9          |
| 2. Pengelolaan Keuangan Daerah .....         | 10         |
| 3. Akuntansi Sektor Publik dalam Islam ..... | 13         |
| B. Anggaran .....                            | 14         |
| 1. Pengertian Anggaran.....                  | 14         |
| 2. Fungsi Anggaran .....                     | 14         |
| 3. Evaluasi Anggaran .....                   | 17         |

|    |   |    |
|----|---|----|
| C. | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....         | 20 |
| 1. | Pengertian APBD .....                                   | 20 |
| 2. | Tahapan Penyusunan Anggaran .....                       | 21 |
| 3. | Perubahan APBD .....                                    | 22 |
| 4. | Klasifikasi APBD .....                                  | 23 |
| 5. | Laporan Realisasi Anggaran .....                        | 26 |
| D. | Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ..... | 28 |
| 1. | Analisis Kinerja Pendapatan .....                       | 29 |
| 2. | Analisis Kinerja Belanja .....                          | 32 |
| E. | Penelitian Relevan .....                                | 35 |
| F. | Defenisi Operasional .....                              | 37 |
| G. | Kerangka Berfikir .....                                 | 38 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|    |                                   |    |
|----|-----------------------------------|----|
| A. | Jenis Penelitian .....            | 39 |
| B. | Waktu dan Tempat Penelitian ..... | 39 |
| C. | Jenis dan Sumber Data .....       | 39 |
| D. | Teknik Pengumpulan Data.....      | 40 |
| E. | Teknik Analisis Data .....        | 40 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Hasil Penelitian .....                             | 45 |
| 1. | Gambaran Umum Pemerintah Kota Padang Panjang ..... | 45 |
| 2. | Gambaran Umum DPPKAD Kota Padang Panjang .....     | 48 |
| B. | Pembahasan.....                                    | 53 |
| 1. | Analisis Kinerja Pendapatan .....                  | 53 |
| 2. | Analisis Kinerja Belanja .....                     | 62 |

### **BAB V PENUTUP**

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan ..... | 71 |
| B. | Saran .....      | 73 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi APBD 2013-2015.....           | 5  |
| Tabel 1.2 Pendapatan Tahun Anggaran 2013-2015.....             | 5  |
| Tabel 1.3 Belanja Tahun Anggaran 2013-2015.....                | 6  |
| Tabel 3.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi .....          | 41 |
| Tabel 3.2 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah .....     | 42 |
| Tabel 3.3 Skala Interval Efektivitas .....                     | 42 |
| Tabel 3.4 Skala Interval Efisiensi .....                       | 44 |
| Tabel 4.1 Temuan Penelitian Pendapatan .....                   | 53 |
| Tabel 4.2 <i>Varians</i> Anggaran Pendapatan .....             | 54 |
| Tabel 4.3 Pertumbuhan Pendapatan .....                         | 55 |
| Tabel 4.4 Derajat Desentralisasi .....                         | 57 |
| Tabel 4.5 Skala Interval Derajat Desentralisasi .....          | 57 |
| Tabel 4.6 Kemandirian Keuangan Daerah .....                    | 58 |
| Tabel 4.7 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah .....     | 59 |
| Tabel 4.8 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....              | 59 |
| Tabel 4.9 Efektivitas Pajak Daerah .....                       | 60 |
| Tabel 4.10 Skala Interval Efektivitas .....                    | 61 |
| Tabel 4.11 Temuan Penelitian Belanja .....                     | 62 |
| Tabel 4.12 <i>Varians</i> Belanja .....                        | 63 |
| Tabel 4.13 Pertumbuhan Belanja .....                           | 64 |
| Tabel 4.14 Belanja Operasi terhadap Total Belanja .....        | 65 |
| Tabel 4.15 Belanja Modal terhadap Total Belanja .....          | 66 |
| Tabel 4.16 Belanja Langsung terhadap Total Belanja .....       | 67 |
| Tabel 4.17 Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja ..... | 68 |
| Tabel 4.18 Efisiensi Belanja .....                             | 69 |
| Tabel 4.19 Skala Interval Efisiensi .....                      | 69 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....                              | 38 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kota Padang Panjang ..... | 52 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Izin Melakukan Penelitian dari LP2M
2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari KPPT Padang Panjang
3. Surat Keterangan Penelitian dari BPKD Padang Panjang
4. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2015

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk selalu berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>1</sup> Untuk mewujudkan pemerintah yang baik tersebut diperlukannya suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan penafsiran yang salah dalam penggunaannya.

Suatu negara pasti memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan ekonomi dan keuangan, karenanya topik tentang program-program ekonomi, proyek-proyek investasi dan neraca keuangan banyak diperbincangkan. Sehingga pemerintahan yang bekerja keras mencapai kebijakan ekonomi dan keuangan akan memperoleh kepercayaan dari rakyat, sebaliknya sebuah pemerintahan yang gagal dalam kebijakan ini, akan mendapatkan kritikan dari rakyat, yang pada akhirnya kehilangan kepercayaan mereka.<sup>2</sup>

Perkembangan sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai

---

<sup>1</sup> Rizal Y. Budiman dkk, *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Tiga Daerah Pemekaran Di Provinsi Sulawesi Utara*, (Jurnal EMBA Vol.3 No. 1 Maret 2015), hal. 1205

<sup>2</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, “*Keuangan Publik Islami*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 21

dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah.<sup>3</sup> Otonomi Daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut menggali, mengelola, mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pembangunan.

Tujuan perubahan sektor publik secara umum hampir sama yaitu mengganti sistem dan modal pemerintahan lama ke sistem pemerintahan baru yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, demokratisasi, pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, meningkatkan kinerja, pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan.<sup>4</sup> Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.<sup>5</sup>

Reformasi manajemen publik sebagai suatu perubahan yang dilakukan secara sengaja atas struktur dan proses organisasi sektor publik dengan tujuan untuk menjadikan organisasi berjalan lebih baik. Perubahan struktural meliputi perubahan struktur dan kelembagaan organisasi sektor publik misalnya melalui reorganisasi, restrukturisasi, merger, pemecahan unit organisasi, dan perubahan sistem remunerasi. Perubahan proses organisasi dapat berupa redesain sistem organisasi, perubahan sistem perencanaan dan penganggaran, perubahan sistem pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban.<sup>6</sup>

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2009), hal. 24

<sup>4</sup> Mahmudi, "Manajemen Kinerja Sektor Publik", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 34

<sup>5</sup> Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik...", hal. 22

<sup>6</sup> Mahmudi, "Manajemen Kinerja Sektor Publik...", hal. 34

<sup>7</sup> Ihyaul Ulum, *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pemerintah serta tugas pokok yang harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian kinerja.

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.<sup>8</sup> Anggaran Kinerja pada dasarnya merupakan pembangunan suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan agar terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan personilnya, berdasarkan sasaran strategik, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh modal manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi.<sup>9</sup>

Keberhasilan dari otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki posisi yang lebih penting, dan LRA merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum membuat neraca dan laporan arus kas.<sup>10</sup>

---

Hal. 24

<sup>8</sup> Mahmudi, "*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", (Yogyakarta: STIM YKPN, 2007), hal. 121

<sup>9</sup> Mulyadi, "*Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*", (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 359

<sup>10</sup> Rizal Y. Budiman dkk, "*Analisis Kinerja Belanja...*", hal. 1205

Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah yang telah digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi, mengukur aktivitas pemerintah daerah, kontribusi sumber pendapatan daerah, dan melihat pertumbuhan atau perkembangan pendapatan. Dalam anggaran berbasis kinerja secara strukturnya meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.<sup>11</sup>

Kinerja anggaran pendapatan daerah pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Sedangkan kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom yang menghadapi permasalahan yang sama dengan Kota dan Kabupaten lainnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.<sup>12</sup> Saat ini Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat masih cukup besar yang dapat dilihat dari pendapatan yang di transfer.

Keterbatasan modal dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaku ekonomi, keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah daerah baik dari segi jumlah profesionalisme serta kesejahteraan yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, belum fokus dan optimalnya pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, dan belum efektifnya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional. Akibat dari beberapa hal tersebut daerah mempunyai ketergantungan yang cukup besar pada pemerintah pusat yang

---

<sup>11</sup> Mahmudi, "*Analisis Laporan Keuangan...*", hal. 121

<sup>12</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang

digambarkan dengan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari survei awal, penulis memperoleh data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2015 yaitu sebagai berikut:

**TABEL 1.1**  
**ANGGARAN dan REALISASI APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2013-2015**

| <b>Uraian</b>     | <b>Tahun</b> | <b>Anggaran</b>     | <b>Realisasi</b>    |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Pendapatan Daerah | 2013         | Rp. 418.067.239.360 | Rp. 417.015.118.681 |
|                   | 2014         | Rp. 478.219.616.171 | Rp. 475.208.494.830 |
|                   | 2015         | Rp. 497.538.427.917 | Rp. 505.249.822.186 |
| Belanja Daerah    | 2013         | Rp. 475.637.931.961 | Rp. 393.183.728.547 |
|                   | 2014         | Rp. 544.621.698.906 | Rp. 406.617.041.960 |
|                   | 2015         | Rp. 630.804.257.350 | Rp. 491.459.794.814 |

Sumber: *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2015*

**TABEL 1.2**  
**PENDAPATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2013-2015**

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b> | <b>Pendapatan Transfer</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b> |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 2013         | Rp. 41.513.488.241            | Rp. 374.408.998.840        | Rp. 1.092.631.600                    |
| 2014         | Rp. 51.529.092.671            | Rp. 408.924.801.086        | Rp. 14.754.601.073                   |
| 2015         | RP. 67.115.440.607            | Rp. 438.134.381.579        | -                                    |

Sumber: *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2015*

<sup>13</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang

**TABEL 1.3**  
**BELANJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2013-2015**

| <b>Tahun</b> | <b>Belanja Operasi</b> | <b>Belanja Modal</b> | <b>Belanja Tak Terduga dan Transfer</b> |
|--------------|------------------------|----------------------|---|
| 2013         | Rp. 324.661.970.820    | Rp. 68.215.718.726   | Rp. 306.039.000                         |
| 2014         | Rp. 341.904.376.514    | Rp. 64.712.665.446   | Rp. -                                   |
| 2015         | Rp. 379.707.077.572    | Rp. 111.190.406.986  | Rp. 562.310.256                         |

Sumber: *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2015*

Dari tabel 1.1, dapat dilihat dari segi pendapatan bahwa pada tahun 2013 terdapat selisih sebesar Rp.1.052.120.700, pada tahun 2014 terdapat selisih sebesar Rp.3.011.121.300, pada tahun 2015 tidak terdapat selisih tetapi melebihi dari yang telah dianggarkan. Selanjutnya, dilihat dari segi belanja bahwa pada tahun 2013 terdapat selisih sebesar Rp.82.454.203.414, pada tahun 2014 terdapat selisih sebesar Rp.138.004.656.946, pada tahun 2015 terdapat selisih sebesar Rp.139.344.462.536.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan tahun 2013 dan 2014 realisasinya belum mencapai yang di anggarkan, karena terdapat selisih pada realisasi dengan anggaran pendapatan. Sedangkan pendapatan tahun 2015 telah terealisasi, karena tidak terdapat selisih pada realisasi dengan anggaran pendapatan.

Sedangkan dilihat dari belanja tahun 2013-2015 realisasinya tidak melebihi dari yang di anggarkan, tetapi belanja daerah lebih besar dialokasikan untuk belanja operasi dari pada belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Untuk itu, diperlukan suatu analisis kinerja keuangan daerah yang mencakup analisis pendapatan dan analisis belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Periode 2013-2015”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan anggaran pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang selama periode 2013-2015.
2. Kinerja keuangan anggaran belanja Pemerintah Kota Padang Panjang selama periode 2013-2015.
3. Kendala yang dihadapi manajemen dalam penilaian kinerja keuangan.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi batasan masalah yang dibahas dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan anggaran pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang selama periode 2013-2015?
2. Bagaimana kinerja keuangan anggaran belanja Pemerintah Kota Padang Panjang selama periode 2013-2015?

## **D. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang selama periode 2013-2015.

## **E. Tujuan Penelitian**

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan anggaran pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang selama periode 2013- 2015.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan anggaran belanja Pemerintah Kota Padang Panjang selama periode 2013-2015.

## **F. Manfaat Penelitian**

Semua informasi yang dihasilkan dikumpulkan melalui penelitian dan studi literatur ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi ilmu pengetahuan, bagi penulis, dan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Bagi Penulis
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
  - b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Periode 2013-2015.
3. Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Keuangan Daerah**

##### **1. Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah yang meliputi seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah, ia juga menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membelanjai belanja.<sup>14</sup>

Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.<sup>15</sup> Akuntansi pemerintahan/ keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi yang didalamnya terdapat akuntansi keuangan daerah yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dipemerintahan daerah.<sup>16</sup> Jadi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan, evaluasi keuangan dan segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kerangka anggaran pendapatan belanja daerah.

---

<sup>14</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, “*Keuangan Publik Islami*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 8

<sup>15</sup> Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian pengelolaan keuangan daerah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2007), Hal. 74

<sup>16</sup> Abdul Halim, *Akuntansi...*, Hal.78

## 2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi (mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya masukan (*input resources*) seminimal mungkin), efisiensi mengukur sejauh mana pemerintah dapat mencapai keluaran optimal dengan sumber daya masukan seminimal mungkin (*output/input*), efektivitas (mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target yang ditetapkan), transparan, dan akuntabel. Siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya terdiri dari tiga tahap yaitu:<sup>17</sup>

### a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu apa yang menjadi *input*, proses, dan *output*-nya. *Input* dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen perencanaan yang dimiliki pemerintah daerah. Perencanaan itu sendiri pada dasarnya juga terdapat proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan *output* perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah tersebut meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 4) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- 5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
- 6) Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 7) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

---

<sup>17</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2007), Hal. 14

Dokumen perencanaan daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan.
- 2) Dokumen perencanaan keuangan daerah berupa Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, serta RAPBD.

*Output* dari tahap perencanaan ini adalah berupa RAPBD. Mengapa RAPBD yang menjadi *output* utama dalam perencanaan, karena bagi pemerintah daerah APBD merupakan tulang punggung pembangunan daerah. APBD memiliki fungsi penting dalam melakukan distribusi, alokasi, dan stabilisasi keuangan di daerah. Oleh karena itu, RAPBD menjadi sangat penting bagi daerah, arah dan orientasi pembangunan daerah dapat tergambar di RAPBD tersebut.

Sebelum menjadi RAPBD, terdapat proses yang harus dilalui yaitu proses perencanaan anggaran. Proses perencanaan anggaran terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan perencanaan dari atas (*top down*) dan partisipatif (*bottom up*). Pendekatan *top down* adalah berupa penentuan Kebijakan Umum APBD serta penetapan prioritas dan plafon anggaran. Sedangkan perencanaan *bottom up* adalah berupa usulan program, kegiatan, dan anggaran dari masing-masing unit kerja (SKPD).

Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja, proses penyusunan anggaran dilakukan melalui pengisian formulir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh setiap satuan kerja yang ada di pemerintah daerah. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk setiap kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut kemudian direkapitulasi sehingga menghasilkan RAPBD SKPD. RAPBD SKPD tersebut akan dievaluasi dan dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kompilasi dari seluruh RKA SKPD akan menjadi RAPBD yang nantinya segera

disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi APBD.

b. Tahap Pelaksana atau Implementasi

*Output* dari tahap perencanaan adalah berupa RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. *Output* perencanaan tersebut akan menjadi *input* bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini sangat penting, karena bagaimanapun bagusya perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang direncanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Sistem akuntansi yang buruk akan memicu terjadinya kebocoran anggaran, inefisiensi, dan ketidakakuratan laporan keuangan. Melalui sistem akuntansi pemerintah daerah itulah akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan *output* dari tahap pelaksanaan.

c. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

*Output* dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi *input* bagi tahap pelaporan. *Input* tersebut akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Proses pelaporan tersebut dilakukan dengan memacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka laporan keuangan daerah siap untuk diaudit oleh auditor independen, selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 15-16

### 3. Akuntansi Sektor Publik dalam Islam

Menurut Abu Ubaid yang menulis kitab *Al-Amwal*, yang mengungkapkan mengenai pendapatan publik yaitu *sunuful amwaal allati yalii al-a'immah liirro'iyah*, yang memiliki arti beberapa macam bentuk kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk rakyat. Soeharto (2004: 83) menyimpulkan bahwa terdapat empat konsep penting yang terkandung dalam definisi diatas, yaitu *amwal* (harta kekayaan), *wilayah* (pengelolaan), *imamah* (pemerintah), dan *ro'iyah* (rakyat). Yang dimaksud dengan *amwal* adalah kekayaan atau hak milik yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, *wilayah* dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan kekayaan publik, *imamah* dan *ro'iyah* adalah pemerintah dan rakyat, dimana syarat mutlak suatu pemerintah adalah kepercayaan.<sup>19</sup>

Peran pemerintah dalam aktivitas perekonomian pada masa sahabat yang selalu disesuaikan dengan teori-teori ekonomi dan *maqasid syariah*.<sup>20</sup> *Maqasid syari'ah* dalam perspektif ekonomi Islam dipahami dengan pembangunan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan tersebut harus terlihat dalam indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, kesehatan dan keserasian lingkungan sosial dengan norma-norma dan nilai-nilai Islam. Penentuan anggaran belanja pemerintah/negara dalam perspektif *maqasid syari'ah* disesuaikan dengan lima hirarki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan terlindungi diantaranya: perlindungan terhadap Agama (*Hifdzu ad-Din*); perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdzu an-nafs*); perlindungan terhadap Akal (*Hifdzu al-Aql*); perlindungan terhadap Keturunan (*Hifdzu an-Nasl*); perlindungan terhadap Harta (*Hifdzu al-*

---

<sup>19</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, "*Keuangan Publik...*", hal. 7-8

<sup>20</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, "*Keuangan Publik...*", hal. 31

Mal).<sup>21</sup> *Maqasid syariah* sebagai alat ukur untuk melihat tingkat pencapaian realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

## B. Anggaran

### 1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Anggaran juga menggambarkan mengenai rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah berdasarkan mandate yang diberikan oleh para *stakeholder* pemerintah daerah.<sup>22</sup>

Anggaran adalah pernyataan-pernyataan dalam kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang datang.<sup>23</sup> Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.<sup>24</sup>

Jadi anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasi rencana yang telah disusun.

### 2. Fungsi Anggaran

Anggaran sektor publik/pemerintah mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

---

<sup>21</sup> Maftukhatusolikah, *Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah Evaluasi terhadap APBN 2008-2013*, (jurnal Intizar, Vol. 21 No. 1, 2015), hal. 34

<sup>22</sup> Abdul Halim, "Akuntansi...", hal.36

<sup>23</sup> Bastian Bustami dan Nurlela, "*Akuntansi Biaya*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal.1

<sup>24</sup> *Standar Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013) hal.316

<sup>25</sup> Mardiasmo, "*Akuntansi Sektor Publik*", (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2009), hal.63

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
- 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
- 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
- 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- 1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
- 2) Menghitung selisih anggaran (*favourable dan unfavourable variances*)
- 3) Menemukan penyebab dan dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians
- 4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi

ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dari kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*Political tool*). Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik, manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi

pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

g. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan sifatnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Public Sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tunawisma, dan kelompok lain yang tak terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme dan sebagainya.

### **3. Evaluasi Anggaran**

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada

selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.<sup>26</sup>

Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan:

a. Menentukan apa yang akan dievaluasi

Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi dapat mengacu pada suatu program kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya.

b. Merancang kegiatan evaluasi

Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang dihasilkan menjadi jelas.

c. Pengumpulan data

Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

d. Pengolahan dan analisis data

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan sesuai dengan tolak ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.

---

<sup>26</sup> Umar Husein, "Evaluasi Kinerja Perusahaan", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hal.56

e. Pelaporan hasil evaluasi

Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi di dokumentasikan secara tertulis.<sup>27</sup>

Evaluasi yang dilakukan terhadap anggaran pendapatan dan pengeluaran tahun berjalan merupakan sebagai titik awal untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang.<sup>28</sup> Dalam penganggaran diharapkan tidak terlalu banyak perubahan, karena perubahan yang terlalu banyak akan menunjukkan kelemahan fundamental proses penganggaran. Beberapa pertanyaan akan muncul, seperti: apakah masih ada kebutuhan dasar yang diperlukan? Dan apakah angka di anggaran masih wajar?. Jadi dalam proses evaluasi anggaran, fokus penganggaran adalah margin atas perubahan yang pernah dilakukan tahun lalu. Apabila margin tersebut masih di bawah tahun lalu, maka kemungkinan usulan perubahan anggaran akan disetujui namun apabila di atas margin tahun lalu, maka akan muncul pertanyaan ‘apakah bisa ditunda ke anggaran tahun depan?, artinya evaluasi anggaran memang diperlukan, bukan hanya untuk pemenuhan program mendesak yang muncul di tahun berjalan, tetapi juga persiapan untuk menyusun anggaran tahun depan.<sup>29</sup>

Berdasarkan identifikasi kebutuhan anggaran sebagai alat evaluasi, dapat diukur dan dievaluasi bertujuan untuk:

- a. Apakah sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran
- b. Apakah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan
- c. Apakah sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan pembanding yang jelas.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Umar Husein, "Evaluasi...", hal. 76

<sup>28</sup> Indra Bastian, "Akuntansi Sektor...", hal. 182

<sup>29</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor...*, hal 182

<sup>30</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor...*, hal 165

## C. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

### 1. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.<sup>31</sup>

Anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun.<sup>32</sup>

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.<sup>33</sup>

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD berisi tentang daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. APBD merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.<sup>34</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

---

<sup>31</sup> Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.03, Hal. 71

<sup>32</sup> M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA, 2008), Hal.47

<sup>33</sup> Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan..., Hal. 71

<sup>34</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, "*Keuangan Publik Islami...*", Hal. 133

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan APBD menurut pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).<sup>35</sup>

## **2. Tahapan Penyusunan Anggaran**

### **a. Tahapan penyusunan anggaran bersumber dari pemerintah daerah**

Tahapan penyusunan anggaran pembangunan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi, Biro Keuangan dan Biro penyusunan program, untuk mengetahui perkiraan penerimaan/pendapatan daerah untuk tahun yang akan datang.
- b) Mengadakan pertemuan dengan dinas-dinas Propinsi, biro-biro di Sekretariat Wilayah, kantor-kantor dan badan-badan lainnya, yang terkait dengan penyusunan anggaran pembangunan, untuk memberikan penjelasan penyusunan anggaran pembangunan.
- c) Meneliti dan membahas DUPDA bersama biro penyusunan Program Setwilda setra Biro Keuangan Setwilda serta instansi yang bersangkutan.
- d) Mengadakan pertemuan antar bidang di Bappeda bersama ketua Bappeda Propinsi untuk penyaringan DUPDA yang didasarkan tersedianya dana anggaran pembangunan di tahun mendatang dan skala prioritas yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

---

<sup>35</sup> Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), Hal. 221

<sup>36</sup> Indra Bastian, "Akuntansi...", hal.190

- e) Disusun Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Tim Anggaran yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas.
  - f) Di DPRD, RAPBD akan dibahas bersama-sama antara Tim Anggaran Eksekutif dan Tim Anggaran Legislatif.
  - g) Setelah dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD, maka RAPBD dapat disahkan menjadi APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
  - h) Pelaksanaan APBD menunggu pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- b. Tahapan penyusunan anggaran bersumber dari pemerintah pusat
- Tahapan Penyusunan Anggaran Pembangunan yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:
- a) Melalui proses Pra Rekorbang dan Rakorbang Provinsi, bappeda Provinsi akan memproses sumber dana untuk mendukung pelaksanaan bidang-bidang pembanguana berdasarkan proyek yang diajukan oleh dinas-dinas provinsi, satuan organisasi lainnya dalam lingkup Pemda, instansi-instansi sektoral, daerah Provinsi serta badan-badan lainnya yang berada dalam wilayah Provinsi.
  - b) Usulan tersebut akan dibahas oleh Bappeda dengan kanwil Anggaran di daerah dan dihadiri oleh instansi yang bersangkutan. Hasil pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti dan diteruskan ke bappenas untuk dituangkan ke dalam Dip.

### **3. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Perubahan anggaran pendapatan belanja daerah dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>37</sup>

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja

---

<sup>37</sup> Muindro Renyowijoyo, "Akuntansi Sektor....", hal.227-228

- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja.

Peraturan daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD, disertai dokumen- dokumen pendukungnya kepada DPRD, pengambilan keputusan tentang perubahan APBD tersebut dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhir).

#### **4. Klasifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Adapun struktur anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu:

##### **a. Pendapatan Daerah**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.<sup>38</sup>

##### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a) Pendapatan pajak daerah
- b) Pendapatan pajak daerah
- c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah

##### **2) Dana Perimbangan**

Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

---

<sup>38</sup> Standar Akuntansi Pemerintahan...,hal.317

a) Dana bagi hasil pajak

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

1. Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
2. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan
3. Pajak penghasilan pasal 21, pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri

b) Dana bagi hasil bukan pajak (SDA)

c) Dana alokasi umum

d) Dana alokasi khusus

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

a) Pendapatan hibah

b) Pendapatan lainnya.

**b. Belanja Daerah**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.<sup>39</sup>

1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:

a) Belanja pegawai

b) Belanja barang

c) Belanja hibah

d) Belanja bantuan sosial

---

<sup>39</sup> Mahmudi, "Analisis Laporan....", hal.141

e) Belanja bantuan keuangan

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi:

- a) Belanja tanah
- b) Belanja peralatan dan mesin
- c) Belanja bangunan dan gedung
- d) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan
- e) Belanja aset tetap lainnya

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4) Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa antara lain:

- a) Bagi hasil pajak
- b) Bagi hasil retribusi
- c) Bagi hasil lainnya.

**c. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang

dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.<sup>40</sup>

1) Penerimaan Daerah

- a) Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran
- b) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- c) Penerimaan kembali pinjaman pegawai
- d) Penerimaan piutang daerah
- e) Penarikan investasi

2) Pengeluaran Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/BUMD) dan atau milik swasta, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan atau dapat dialihkan kepada BUMD.<sup>41</sup>

## 5. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam satu periode pelaporan.

Hal-hal yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran, mencakup 3 (tiga) unsur pokok antara lain:<sup>42</sup>

a. Pendapatan

Semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi

---

<sup>40</sup> Mahmudi, "Analisis...", hal.155

<sup>41</sup> Muindro Renyowijoyo, "Akuntansi...", hal.225

<sup>42</sup> Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian...*, Hal. 104-105

hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Belanja

Semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:<sup>43</sup>

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintahan pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyaji laporan secara komparatif.
- d. Menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

---

<sup>43</sup> Standar Akuntansi Pemerintahan...,hal.264

- a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat
- b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya(APBD)
- c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### **D. Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.<sup>44</sup>

Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan personelnnya, berdasarkan sasaran strategik, standar ,dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>45</sup>

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), Hal. 7

<sup>45</sup> Mulyadi, *System Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal. 359

<sup>46</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik...*, Hal. 84

Jadi kinerja merupakan hasil karya nyata dari seseorang atau perusahaan yang dapat dilihat, dihitung jumlahnya, dan dapat dicatat waktu perolehannya.

Analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah dapat dilakukan dengan cara:

### **1. Analisis Kinerja Pendapatan**

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.

Melalui Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah antara lain dengan cara:

#### **a. Analisis *Varians* (selisih) Anggaran Pendapatan**

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Pendapatan yang dianggarkan}$$

Analisis *varians* anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi

pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).<sup>47</sup>

### **b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan**

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Tht} - \text{PendapatanT ht-1}}{\text{PendapatanT ht-1}} \times 100\%$$

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atautkah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain.<sup>48</sup>

### **c. Analisis Rasio Keuangan**

#### **1) Rasio Derajat Desentralisasi**

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Dearah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 123

<sup>48</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 124-125

<sup>49</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 124-128

## 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.<sup>50</sup> Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

## 3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Ihyaul Ulum, *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hal.31

<sup>51</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 130

## 2. Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.<sup>52</sup> Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

### a. Analisis Varian (Selisih) Belanja

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Belanja yang dianggarkan}$$

Analisis *varians* merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya.<sup>53</sup> Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

### b. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tht} - \text{Realisasi Belanja Tht-1}}{\text{Realisasi Belanja Tht-1}} \times 100\%$$

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja

---

<sup>52</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 142

<sup>53</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 143

memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.<sup>54</sup>

### c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.<sup>55</sup> Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

#### 1) Analisis belanja operasi terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya standar pengukuran belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen.<sup>56</sup>

#### 2) Analisis belanja modal terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

---

<sup>54</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 146

<sup>55</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 148

<sup>56</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 150

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya, standar pengukuran belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen.<sup>57</sup>

### 3) Analisis belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas), sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

Belanja langsung dapat dikendalikan melalui penetapan anggaran ketat dan efisiensi anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan. Rasio belanja langsung dan tidak langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

---

<sup>57</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 151

#### d. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.<sup>58</sup>

#### E. Penelitian Relevan

1. Yuliana (2013) meneliti tentang *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ditinjau dari Rasio Keuangan di Kabupaten Sragen*. Peneliti menganalisis kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode 2010-2012. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kinerja dalam bentuk rasio keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tahun 2010-2012 sudah baik, tapi penelitian ini tidak menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga tidak dapat memperoleh hasil analisis yang lengkap, perhitungan penelitian ini hanya difokuskan empat model analisis rasio keuangan sehingga tidak didapat hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.

---

<sup>58</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 152

2. Bahrhun Assidiqi (2014) meneliti tentang *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah periode 2008-2012. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dan belanja daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Sedangkan dilihat dari Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.
3. Ibrah Mayu Putra (2015) meneliti tentang *Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2010-2014*. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010-2014. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat tinggi terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat, provinsi dan lainnya sehingga tingkat kemandirian daerah rendah sekali. Efektifitas pendapatan asli daerah dengan rata-rata rasio efektifitas PAD Pemerintah Kota Bukittinggi mencapai kategori efektif. Efisiensi pendapatan asli daerah dengan rata-rata rasio efisiensi Pemerintah Kota Bukittinggi mencapai sangat efisien. Pertumbuhan pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
4. Defvi Martha (2015) meneliti tentang *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah*

*Datar.* Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012-2014. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisis rasio keuangan berupa analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum cukup baik, dapat dilihat dari pendapatan tahun 2012-2014 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. PAD yang tidak signifikan menjadi salah satu faktor pendorong pendapatan yang kurang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Sedangkan dilihat dari analisis kinerja pengelolaan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2012- 2014 sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya.

Beda penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek dan periode penelitian serta ada beberapa indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan penelitian tentang *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Periode 2013-2015.*

## **F. Defenisi Operasional**

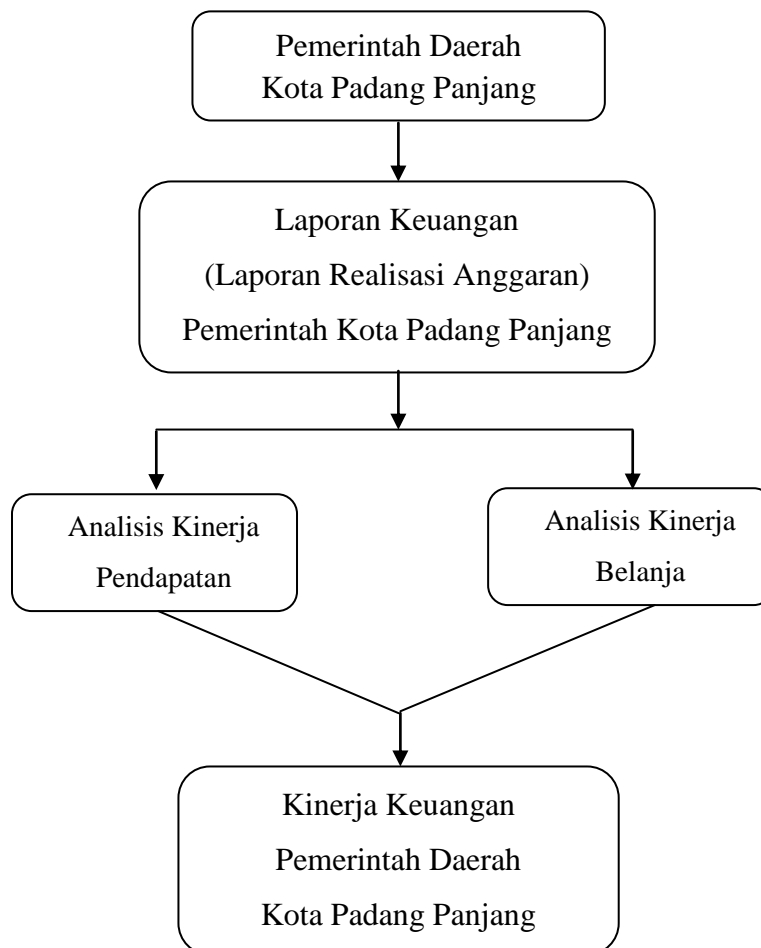
Analisis merupakan penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu tingkat pencapaian hasil dari kegiatan atau program yang berhubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah.

Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebuah kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 8 Tahun 1956. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1957, maka Kota Padang Panjang memiliki status Daerah Otonom atau sejajar dengan Kabupaten/Kota lainnya.<sup>59</sup>

### G. Kerangka Berpikir



**Gambar. 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

---

<sup>59</sup> [www.padangpanjang.go.id](http://www.padangpanjang.go.id) diakses Selasa, 10 Mei 2016 jam 22.47

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu pada Pemerintah Kota Padang Panjang. Jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran terhadap data-data keuangan dari DPPKAD Kota Padang Panjang yang penulis teliti kemudian penulis akan mengolahnya dengan menggunakan alat analisis tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Sehingga penulis dapat mengetahui seberapa besar kinerja pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan pemerintah daerah Kota Padang Panjang.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan November - Desember 2016 pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dengan pengambilan data yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data-data yang sudah tersedia dalam bentuk laporan keuangan yang diperoleh dari pihak kedua atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>60</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang.

---

<sup>60</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal. 148

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari pemerintah daerah berupa data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2015 dan data lainnya yang terkait dengan penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah Analisis rasio keuangan yaitu analisis data yang digunakan dalam menjelaskan hubungan dari data keuangan seperti membandingkan data yang satu dengan yang lain.

Analisis rasio keuangan yang penulis gunakan dalam Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

##### 1. Analisis kinerja pendapatan<sup>61</sup>

###### a. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Pendapatan yang dianggarkan}$$

Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Menghitung besar selisih anggaran pendapatan dan realisasinya baik secara nominal maupun persentase
- 2) Menganalisis selisih anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan
- 3) Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan.

###### b. Analisis pertumbuhan pendapatan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Tht} - \text{PendapatanTht}_{-1}}{\text{PendapatanTht}_{-1}} \times 100\%$$

---

<sup>61</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2007), Hal. 123-129

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.

c. Analisis rasio keuangan

1) Rasio derajat desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Standar Pengukuran derajat desentralisasi adalah:

**Tabel 3.1**  
**Skala Interval Derajat Desentralisasi**

| Persentase     | Kriteria      |
|----------------|---------------|
| >50,00%        | Sangat Baik   |
| 40,01 – 50,00% | Baik          |
| 30,01 – 40,00% | Cukup         |
| 20,01 – 30,00% | Sedang        |
| 10,01 – 20,00% | Kurang        |
| 0,00 – 10,00%  | Sangat Kurang |

Sumber: I Dewa Gde Bisma dkk, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, (Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4 No. 3 Desember 2010), Hal. 78

2) Rasio kemandirian keuangan daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Standar pengukuran kemandirian keuangan daerah adalah

**Tabel 3.2**  
**Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah**

| Persentase     | Kriteria      |
|----------------|---------------|
| >50,00%        | Sangat Baik   |
| 40,01 – 50,00% | Baik          |
| 30,01 – 40,00% | Cukup         |
| 20,01 – 30,00% | Sedang        |
| 10,01 – 20,00% | Kurang        |
| 0,00 – 10,00%  | Sangat Kurang |

Sumber: I Dewa Gde Bisma dkk, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, (Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4 No. 3 Desember 2010), Hal. 77

3) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan pajak daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Rasio Efektivitas Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Standar pengukuran efektifitas adalah:

**Tabel 3.3**  
**Skala Interval Efektivitas**

| Persentase  | Kriteria       |
|-------------|----------------|
| Diatas 100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100%  | Efektif        |
| 80% - 90%   | Cukup Efektif  |
| 60% - 80%   | Kurang Efektif |
| Dibawah 60% | Tidak Efektif  |

Sumber: I Dewa Gde Bisma dkk, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, (Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4 No. 3 Desember 2010), Hal. 78

## 2. Analisis kinerja belanja<sup>62</sup>

### a. Analisis varians (selisih) belanja

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Belanja yang dianggarkan}$$

Dalam analisis selisih belanja, hal utama yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Menghitung besar selisih anggaran belanja dan realisasinya baik secara nominal maupun persentase
- 2) Menganalisis selisih anggaran belanja dan realisasi belanja.

### b. Analisis pertumbuhan belanja

Pertumbuhan Belanja =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Tht} - \text{Realisasi Belanja Tht-1}}{\text{Realisasi Belanja Tht-1}} \times 100\%$$

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

### c. Analisis keserasian belanja

#### 1) Analisis belanja operasi terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Pada umumnya proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

#### 2) Analisis belanja modal terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total Belanja daerah adalah antara 5-20%.

---

<sup>62</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 143-152

3) Analisis belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Pada umumnya proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah adalah antara 60-90%.

d. Rasio efisiensi belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Standar pengukuran efisiensi adalah:

**Tabel 3.4**  
**Skala Interval Efisiensi**

| Persentase  | Kriteria         |
|-------------|------------------|
| Diatas 100% | Tidak Efisiensi  |
| 90% - 100%  | Kurang Efisiensi |
| 80% - 90%   | Cukup Efisiensi  |
| 60% - 80%   | Efisiensi        |
| Dibawah 60% | Sangat Efisiensi |

Sumber: I Dewa Gde Bisma dkk, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, (Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4 No. 3 Desember 2010), Hal. 79

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Padang Panjang**

Padang Panjang yang terkenal dengan kota Serambi Mekah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, maka Kota Kecil Padang Panjang memiliki status sejajar dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor : 12/K/DPRD-PP/57 tanggal 25 September tahun 1957 tentang Peralihan Kota Praja, maka Kota Praja Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah administratif yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982, Kota Padang Panjang dibagi atas dua kecamatan dengan 16 kelurahan, dimana masing-masing kecamatan terdiri dari delapan kelurahan.

Secara geografis Padang Panjang merupakan Kota terkecil dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha atau sekitar 0.05% dari luas Sumatera Barat, terletak antara 1000 20' dan 1000 04' Bujur Timur serta 00 27' dan 00 32' Lintang Selatan. Kota Padang Panjang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar dan diapit oleh Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh yang merupakan dua wilayah dari Kabupaten Tanah Datar.

Kota Padang Panjang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dengan luas 975 Ha dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas 1.325 Ha, masing-masing kecamatan memiliki delapan kelurahan. Padang Panjang memiliki topografi bergelombang dan terletak

pada dataran tinggi yang menyebabkan daerah ini terkenal dengan iklim sejuknya dengan ketinggian antara 650 sampai 850 meter dari permukaan laut, diapit oleh tiga gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat serta memiliki curah hujan selama tahun 2013 mencapai 4.005,7 mm.

Visi jangka menengah daerah yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang (RPJMD) 2013-2018:

**“AMANAHAH, AMAN DAN SEJAHTERA”**

Berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi pembangunan Padang Panjang 2013-2018 sebagaimana berikut:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, bertaqwa, berakhlak mulia, profesional, unggul dan bersaing melalui pelayanan pendidikan yang prima dan berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat;
- c. Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah yang bertitik tolak pada peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis perdagangan, industri dan pariwisata yang dibangundengan semangat islami dan dilandasi modernitas serta kegotongroyongan;
- d. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota dalam rangka mendukung pelayanan dasar;
- e. Meningkatkan sarana pelayanan umum, seperti pusat perbelanjaan/pasar rakyat, sarana jalan lingkar yang mendukung hidupnya ekonomi rakyat;
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam kota secara optimal, bijaksana dan berkelanjutan;

Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki beberapa SKPD yaitu sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Dinas Pendidikan, dengan UPTD:

- 1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- 2) UPTD SLTP, terdiri dari:
  - UPTD SMP Negeri 1
  - UPTD SMP Negeri 2
  - UPTD SMP Negeri 3
  - UPTD SMP Negeri 4
  - UPTD SMP Negeri 5
- 3) UPTD SLTA, terdiri dari:
  - UPTD SMA Negeri 1
  - UPTD SMA Negeri 2
  - UPTD SMA Negeri 3
  - UPTD SMK Negeri 1
  - UPTD SMK Negeri 2
- d. Dinas Kesehatan, dengan UPTD:
  - 1) UPTD Instalasi Farmasi
  - 2) UPTD Puskesmas Gunung
  - 3) UPTD Puskesmas Bukit Surungan
  - 4) UPTD Puskesmas Koto Katik
  - 5) UPTD Puskesmas Bukit Surungan
- e. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan UPTD:
  - 1) UPTD Terminal
  - 2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- h. Dinas Pekerjaan Umum
  - 1) UPTD Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- i. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan , dengan UPTD:
  - 1) UPTD Pengolahan Kulit
  - 2) UPTD Pegelolaan Dana Bergulir
- j. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- l. Dinas Pertanian, dengan UPTD:
  - 1) UPTD RPH
  - 2) UPTD Puskesmas
  - 3) UPTD BBI
- m. BAPPEDA
- n. BKD (Badan Kepegawaian Daerah)
- o. Inspektorat
- p. Kantor Lingkungan Hidup
- q. Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
- r. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- s. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
- t. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB
- u. RSUD
- v. Kantor Pengelolaan Pasar
- w. BPBD dan Kesbangpol, dengan UPT:
  - 1) UPT Pemadam Kebakaran
- x. Satpol PP
- y. KPPT
- z. Kecamatan
  - 1) Padang Panjang Barat
  - 2) Padang Panjang Timur

## **2. Gambaran Umum DPPKAD Kota Padang Panjang**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang merupakan daerah yang menjadi objek dalam penelitian ini. DPPKAD Kota Padang Panjang merupakan penggabungan Dinas Pendapatan, bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan Sub bagian Aset pada bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Kota Padang Panjang. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang adalah salah satu dari Satuan

Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu unit organisasi berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 dengan fungsi pokoknya yaitu mengelola administrasi keuangan daerah kota Padang Panjang yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang.

Pembentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kepada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang.

Tugas-tugas DPPKAD Kota Padang Panjang yaitu melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan utama pemusatan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab di Kota Padang Panjang adalah untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, terutama sekali dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa yang serasi dan seimbang antara pusat dan daerah, karena memang disadari bahwa Kota Padang Panjang lebih mengetahui aspirasi dan hubungan langsung dengan masyarakat.

Adapun bagian yang berada di DPPKAD sebagai berikut:

1. Sekretariat
2. Bidang Akuntansi dan Verifikasi

3. Bidang Pengelolaan Aset dan Pengkajian Keuangan Daerah
4. Bidang Pendapatan
5. Bidang Anggaran dan Pembendaharaan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPPKAD sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2010 bahwa DPPKAD melaksanakan sebagaimana urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dalam pelaksanaannya DPPKAD berjalan sebagai pengemban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kota Padang Panjang serta berdasarkan analisis kondisi serta permasalahan yang ada.

Visi DPPKAD dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018, dengan **VISI** : *“Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera”*. Sedangkan **MISI** yang diemban oleh DPPKAD Kota Padang Panjang dengan mengacu pada misi 1 yaitu *“Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang amanah dan anti KKN”*. Maka dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, maka visi DPPKAD tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
YANG TRANSPARAN DAN ANTI KKN “**

Makna pokok yang terkandung dalam Visi diatas adalah bahwa pengelolaan keuangan dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Transparan, yaitu terbuka mulai dari sistem penganggaran sampai pertanggungjawaban sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak manapun. Sehingga dalam pelaksanaannya harus menganut azas-azas:

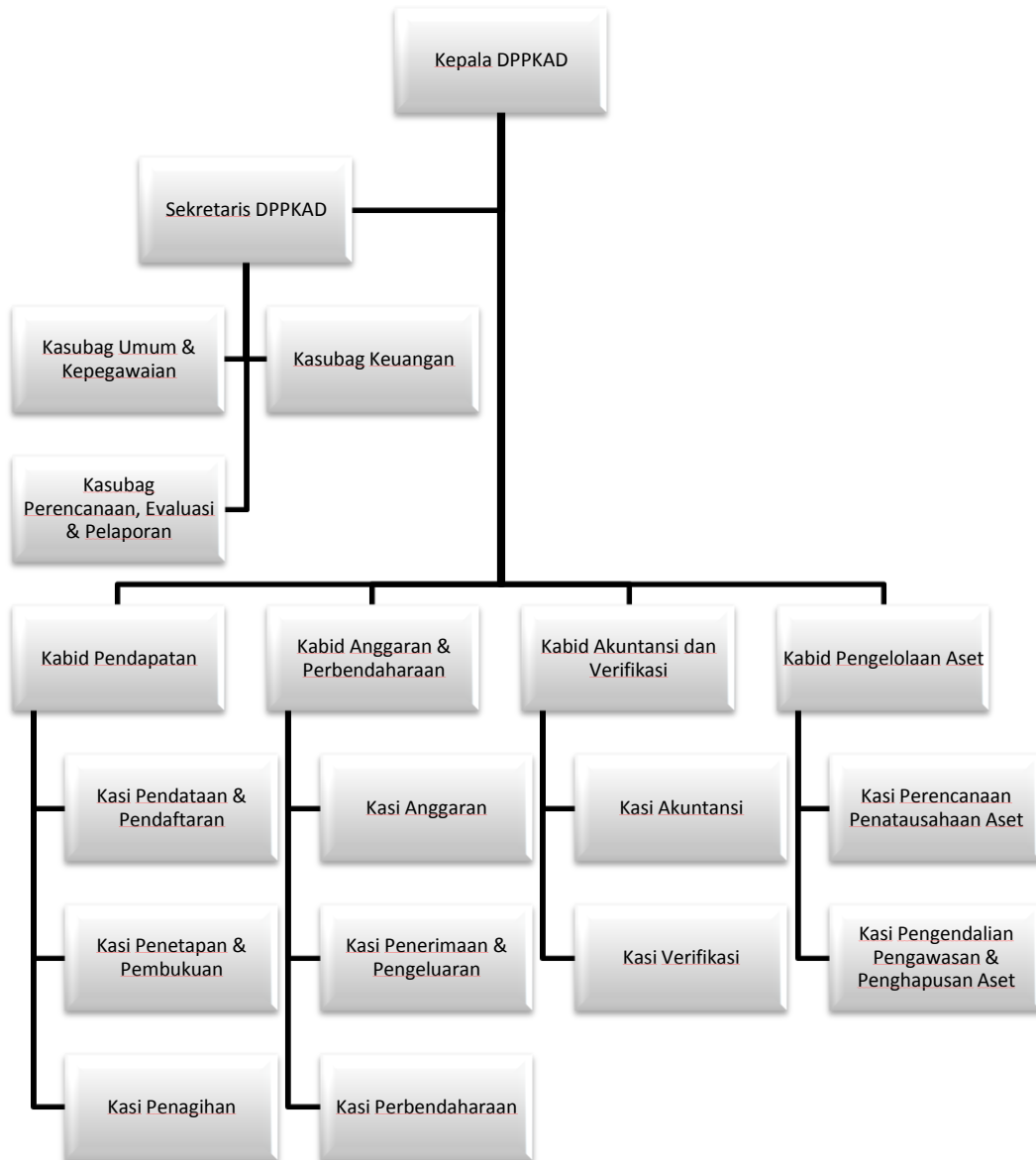
- 1) Responsif, yaitu pengelolaan keuangan tidak hanya dari sistem perlakuan perundang-undangan secara top down tetapi direkrut secara bottom up contohnya penyediaan anggaran dalam APBD berawal adanya usulan masyarakat dalam musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sampai ke Kota.
  - 2) Akuntabel, artinya Rumusan Anggaran yang direalisasikan melalui pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 3) Terukur, artinya Penetapan rencana penerimaan ditetapkan setelah melakukan kajian sesuai dengan potensi yang ada dan rencana belanja ditetapkan berdasarkan standar berlaku dan kondisi ekonomi yang telah terjadi secara nasional.
- b. Anti KKN, yaitu setiap item pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah didukung dengan regulasi yang mengacu kepada peraturan perundangan yang lebih tinggi sehingga tidak dimungkinkan terjadinya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara profesional.
- b. Mewujudkan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel dan anti KKN.
- c. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah
- d. Menyempurnakan sistem manajemen Pengelolaan Aset Daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Padang Panjang saat ini beralamat di Jl. St. Syahrir No. 178 Kel. Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat. Dikepalai oleh Bapak Rusdianto SIP, MM. DPPKAD Kota Padang Panjang memiliki lima bagian/bidang yang dapat dilihat dari bagan dibawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi DPPKAD Padang Panjang**



Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
  - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Subbag Keuangan dan;
  - 3) Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  - 2) Seksi Penetapan dan Pembukuan; dan
  - 3) Seksi Penagihan.
- d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Anggaran;
  - 2) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran;
  - 3) Seksi Perbendaharaan.
- e. Bidang Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Akuntansi;
  - 2) Seksi verifikasi.
- f. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
  - 1) Seksi Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah; dan
  - 2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan Aset

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Kinerja Pendapatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset peneliti mendapatkan temuan penelitian dalam kinerja pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Temuan Penelitian Pendapatan**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b> | <b>Anggaran<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>2013</b>  | 418.067.239.360          | 417.015.118.681           | 99,75 %           |
| <b>2014</b>  | 478.219.616.171          | 475.208.494.830           | 99,37 %           |
| <b>2015</b>  | 497.538.427.917          | 505.249.822.186           | 101,55 %          |
| <b>Total</b> | <b>1.393.825.283.448</b> | <b>1.397.473.435.697</b>  | <b>100,26 %</b>   |

*Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2015*

Dari temuan penelitian di atas, pada tahun 2013 anggaran pendapatan sebesar Rp.418.067.239.360 yang terealisasi hanya sebesar Rp.417.015.118.681, pada tahun 2014 anggaran pendapatan sebesar Rp.478.219.616.171 yang terealisasi sebesar Rp.475.208.494.830, dan pada tahun 2015 realisasinya sudah melebihi dari yang di anggaran anggaran pendapatan sebesar Rp.497.538.427.917 yang terealisasi hanya sebesar Rp.505.249.822.186 maka tahun 2013-2014 realisasi pendapatan belum melebihi dari yang di anggaran. Jadi dari temuan diatas penulis akan menganalisis kinerja anggaran pendapatan tersebut dengan menggunakan beberapa analisis yang terkait dengan analisis kinerja pendapatan.

Dengan menggunakan data realisasi anggaran dan anggaran pendapatan daerah, dilakukan analisis kinerja pendapatan dengan menggunakan cara analisis:

**a. Analisis *Varians* (Selisih) Anggaran Pendapatan**

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Pendapatan yang dianggarkan}$$

**Tabel 4.2**  
**Varians Anggaran Pendapatan**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b> | <b>Anggaran<br/>(Rp)</b> | <b>Selisih<br/>(Rp)</b> |
|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>2013</b>  | 417.015.118.681           | 418.067.239.360          | (1.052.120.700)         |
| <b>2014</b>  | 475.208.494.830           | 478.219.616.171          | (3.011.121.300)         |
| <b>2015</b>  | 505.249.822.186           | 497.538.427.917          | 7.711.394.200           |
| <b>Total</b> | <b>1.397.473.435.697</b>  | <b>1.393.825.283.448</b> | <b>3.648.152.000</b>    |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari tabel perhitungan pendapatan menggunakan analisis *varians*, kinerja pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2013-2015 secara keseluruhan adalah 100,26%. Kalau dilihat dari *varians* (selisih)

nominalnya positif. Karena dari total keseluruhan realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan. Akan tetapi, kalau dilihat dari persentase realisasi pada setiap tahun maka pendapatan yang dianggarkan pada tahun 2013 sebesar 99,75%, pada tahun 2014 sebesar 99,37% terjadi penurunan sebesar 0,38%, pada tahun 2015 terjadi peningkatan 2,18% sehingga menjadi 101,55%. Dari rasio di atas dapat diketahui bahwa rasio tertinggi berada pada tahun 2015 dan rasio terendah berada pada tahun 2014. Karena tahun 2013 dan 2014 realisasi pendapatan tidak mencapai yang dianggarkan.

Pada prinsipnya, Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Analisis kinerja menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Padang Panjang selama periode 2013-2015 dapat dikatakan baik, karena total pendapatan yang terealisasi sudah melebihi yang telah dianggarkan.

#### **b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan**

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Tht} - \text{PendapatanTht}_{-1}}{\text{PendapatanTht}_{-1}} \times 100\%$$

**Tabel 4.3**  
**Pertumbuhan Pendapatan**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>Total Pendapatan (Rp)</b> | <b>Pertumbuhan</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b> | <b>Pertumbuhan</b> |
|------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 2012             | 372.888.777.403              | -                  | 32.420.607.300                     | -                  |
| 2013             | 417.015.118.681              | 11,83%             | 41.513.488.241                     | 28,05%             |
| 2014             | 475.208.494.830              | 13,95%             | 51.529.092.671                     | 24,13%             |
| 2015             | 505.249.822.186              | 6,32%              | 67.115.440.607                     | 30,25%             |
| <b>Rata-rata</b> |                              | <b>10,7%</b>       |                                    | <b>27,48%</b>      |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari tabel perhitungan di atas, persentase pertumbuhan pendapatan dilihat dari total pendapatan pada tahun 2013 sebesar 11,83%, pada tahun 2014 sebesar 13,95% mengalami peningkatan sebesar 2,12% seiring dengan kenaikan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat, pada tahun 2015 sebesar 6,32% mengalami penurunan sebesar 7,63%. Sementara itu pertumbuhan pendapatan juga menunjukkan pertumbuhan positif yang mana rata-rata 10,7% dengan tingkat pertumbuhannya juga berfluktuasi.

Sedangkan persentase pertumbuhan PAD dilihat dari total pendapatan asli daerah pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2013 sebesar 28,05%, pada tahun 2014 sebesar 24,13% mengalami penurunan sebesar 3,92%, dan pada tahun 2015 sebesar 30,25% mengalami peningkatan 6,12%. Hal ini dikarenakan komponen PAD mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi tahun 2015. Dapat dilihat bahwa total pendapatan dan total PAD dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan secara positif, karena pertumbuhan pendapatan asli daerah terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain.

### **c. Analisis Rasio Keuangan**

#### **1) Rasio Derajat Desentralisasi**

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4.4**  
**Derajat Desentralisasi**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b> | <b>Pendapatan Daerah (Rp)</b> | <b>Rasio Derajat Desentralisasi</b> |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 2013             | 41.513.488.241                     | 417.015.118.681               | 9,95%                               |
| 2014             | 51.529.092.671                     | 475.208.494.830               | 10,84%                              |
| 2015             | 67.115.440.607                     | 505.249.822.186               | 13,28%                              |
| <b>Rata-rata</b> |                                    |                               | <b>11,36%</b>                       |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa persentase derajat desentralisasi dari pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2013 sebesar 9,95% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2014 sebesar 10,84% dengan kriteria kurang, tapi terjadi peningkatan nominal sebesar 0,89%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 13,28% dengan kriteria kurang juga, dan terjadi peningkatan sebesar 2,44%. Sehingga rata-rata derajat desentralisasi dari tahun 2013-2015 adalah sebesar 11,36%.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa derajat desentralisasi selama tahun 2013-2015 pada pemerintah Kota Padang Panjang masih dalam skala interval yang kurang, karena masih berada dalam skala interval 10,01 – 20,00% yaitu 11,36%.

**Tabel 4.5**  
**Skala Interval Derajat Desentralisasi**

| <b>Persentase</b> | <b>Kriteria</b> |
|-------------------|-----------------|
| >50,00%           | Sangat Baik     |
| 40,01 – 50,00%    | Baik            |
| 30,01 – 40,00%    | Cukup           |
| 20,01 – 30,00%    | Sedang          |
| 10,01 – 20,00%    | Kurang          |
| 0,00 – 10,00%     | Sangat Kurang   |

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Ini berarti tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

kepada pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengelola pendapatan asli daerah kurang maksudnya belum terkelolanya pendapatan asli daerah dengan baik. Untuk kedepannya Pemerintah Kota Padang Panjang harus lebih berupaya untuk dapat meningkatkan PAD nya, baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang sudah ada.

## 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

**Tabel 4.6**  
**Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>PAD<br/>(Rp)</b> | <b>Transfer pusat +<br/>Provinsi + Pinjaman<br/>(Rp)</b> | <b>Rasio<br/>Kemandirian</b> |
|------------------|---------------------|--|------------------------------|
| 2013             | 41.513.488.241      | 374.408.998.840  | 11,09%                       |
| 2014             | 51.529.092.671      | 408.924.801.086  | 12,60%                       |
| 2015             | 67.115.440.607      | 438.134.381.579  | 15,32%                       |
| <b>Rata-rata</b> |                     |  | <b>13,00%</b>                |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Padang Panjang dari pendapatan asli daerah terhadap transfer pusat+provinsi+pinjaman pada tahun 2013 sebesar 11,09% dengan kriteria kurang, pada tahun 2014 sebesar 12,60% dengan kriteria kurang, tapi terjadi peningkatan sebesar 1,51%, dan pada tahun 2015 sebesar 15,32% dengan kriteria kurang, terjadi peningkatan lagi sebesar 2,72%. Dan dilihat dari rata-rata tahun 2013-2015 rasio ini hanya sebesar 13,00%. Karena tingkat rasio kemandirian keuangan daerah selalu berada dibawah 10,01– 20,00% maka kinerjanya dikatakan kurang.

**Tabel 4.7**  
**Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah**

| <b>Persentase</b> | <b>Kriteria</b> |
|-------------------|-----------------|
| >50,00%           | Sangat Baik     |
| 40,01 – 50,00%    | Baik            |
| 30,01 – 40,00%    | Cukup           |
| 20,01 – 30,00%    | Sedang          |
| 10,01 – 20,00%    | Kurang          |
| 0,00 – 10,00%     | Sangat Kurang   |

Analisis kinerja menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Padang Panjang masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau provinsi. Untuk itu, perlunya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana dari luar (Ekstern) dan meminta kewenangan yang bertanggung jawab untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat atau provinsi.

**3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah**

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

**Tabel 4.8**  
**Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>Realisasi Penerimaan PAD (Rp)</b> | <b>Anggaran/Target Penerimaan PAD (Rp)</b> | <b>Rasio Efektivitas PAD</b> |
|------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 2013             | 41.513.488.241                       | 37.828.203.121                             | 109,74%                      |
| 2014             | 51.529.092.671                       | 46.724.333.148                             | 110,28%                      |
| 2015             | 67.115.440.607                       | 53.068.561.858                             | 126,47%                      |
| <b>Rata-Rata</b> |                                      |  | <b>115,50%</b>               |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah Kota Padang Panjang adalah sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang direncanakan. Pada tahun 2013 rasio efektivitas PAD sebesar 109,74% dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2014 rasio efektivitas PAD sebesar 110,28% dengan kriteria sangat efektif dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan rasio efektivitas PAD sebesar 126,47% dengan kriteria sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata ketiga tahun tersebut yang mencapai 115,50%, karena tingkat rasio efektivitas PAD berada di atas 100% dilihat berdasarkan skala pengukuran, maka kinerjanya dikatakan sangat efektif. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja pemerintah Kota Padang Panjang dapat dikatakan baik jika dilihat dari rasio efektivitas PAD.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4.9**  
**Efektivitas Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)</b> | <b>Anggaran/Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)</b> | <b>Rasio Efektivitas Pajak Daerah</b> |
|------------------|---|---|---------------------------------------|
| 2013             | 4.060.955.402                                 | 4.078.500.000                                       | 99,57%                                |
| 2014             | 5.388.058.175                                 | 5.051.000.000                                       | 106,67%                               |
| 2015             | 5.556.826.451                                 | 5.086.739.000                                       | 109,24%                               |
| <b>Rata-Rata</b> |   |   | <b>105,16%</b>                        |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari perhitungan di atas, efektivitas pajak daerah dari realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak daerah pada tahun 2013 rasio efektivitas pajak daerah sebesar 99,57% dengan kriteria efektif, pada tahun 2014 rasio efektivitas pajak daerah sebesar 106,67% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2015 rasio efektivitas pajak daerah

sebesar 109,24% dengan kriteria sangat efektif. Karena realisasi pajak daerah mencapai angka yang ditargetkan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja efektivitas pajak daerah pemerintah Kota Padang Panjang secara rata-rata adalah sangat efektif, karena berada pada skala pengukur di atas 100%. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata dari tahun 2013-2015 sebesar 105,16%.

**Tabel 4.10**  
**Skala Interval Efektivitas**

| <b>Persentase</b> | <b>Kriteria</b> |
|-------------------|-----------------|
| Diatas 100%       | Sangat Efektif  |
| 90% - 100%        | Efektif         |
| 80% - 90%         | Cukup Efektif   |
| 60% - 80%         | Kurang Efektif  |
| Dibawah 60%       | Tidak Efektif   |

Analisis kinerja menunjukkan bahwa efektivitas dinilai sangat perlu dalam segala bidang pekerjaan, organisasi swasta atau pemerintahan. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Efektivitas PAD dinilai dari perbandingan realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD. Sedangkan Efektivitas pajak daerah dinilai dari perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan target penerimaan pajak daerah. Untuk hasil efektifitas PAD dan Efektivitas pajak daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dapat dilihat Hasil selama tahun 2013-2015 yaitu sangat efektif.

Berdasarkan beberapa analisis diatas menunjukkan bahwa analisis kinerja anggaran pendapatan Pemerintah Kota Padang Panjang belum cukup baik, dapat dilihat dari pendapatan pada tahun 2013-2014 yang belum mencapai target yang telah dianggarkan, meskipun pada tahun 2015 telah terealisasi tetapi terlalu melebihi dari yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah yang tidak signifikan menjadi salah satu faktor pendorong pendapatan menjadi kurang terealisasi dari anggaran yang telah dianggarkan.

## 2. Analisis Kinerja Belanja

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset peneliti mendapatkan temuan penelitian dalam kinerja belanja sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Temuan Penelitian Belanja**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b> | <b>Anggaran<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b> | <b>Persentase</b> |
|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| 2013         | 475.637.931.961          | 393.183.728.547           | 82,66%            |
| 2014         | 544.621.698.906          | 406.617.041.960           | 74,66%            |
| 2015         | 630.804.257.350          | 491.459.794.814           | 77,91%            |
| <b>Total</b> | <b>1.651.063.888.217</b> | <b>1.291.260.565.321</b>  | <b>78,41%</b>     |

*Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2015*

Dari temuan penelitian di atas, pada tahun 2013 anggaran belanja sebesar Rp.475.637.931.961 dengan realisasinya sebesar Rp.393.183.728.547 pada tahun 2014 anggaran belanja sebesar Rp.544.621.698.906 dengan realisasinya sebesar Rp.406.617.041.960 dan pada tahun 2015 anggaran belanja sebesar Rp.630.804.257.350 dengan realisasinya sebesar Rp.491.459.794.814 maka pada tahun 2013-2015 realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Jadi dari temuan di atas penulis akan menganalisis kinerja anggaran belanja tersebut dengan menggunakan beberapa analisis yang terkait dengan analisis kinerja belanja.

Dengan menggunakan data realisasi anggaran dan anggaran belanja daerah, dilakukan analisis kinerja belanja dengan menggunakan cara analisis:

### a. Analisis *Varians* (Selisih) Anggaran Belanja

*Varians* Belanja= Realisasi Belanja – Belanja yang dianggarkan

**Tabel 4.12**  
**Varians Anggaran Belanja**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b> | <b>Anggaran<br/>(Rp)</b> | <b>Selisih<br/>(Rp)</b> |
|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>2013</b>  | 393.183.728.547           | 475.637.931.961          | 82.454.203.414          |
| <b>2014</b>  | 406.617.041.960           | 544.621.698.906          | 138.004.656.946         |
| <b>2015</b>  | 491.459.794.814           | 630.804.257.350          | 139.344.462.536         |
| <b>Total</b> | <b>1.291.260.565.321</b>  | <b>1.651.063.888.217</b> | <b>359.803.322.896</b>  |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari tabel perhitungan belanja menggunakan analisis *varians*, kinerja pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2013-2015 secara keseluruhan adalah 78,41%. Pada tahun 2013-2015 realisasi tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan. Persentase realisasi belanja dari belanja yang dianggarkan pada tahun 2013 sebesar 82,66%, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 74,66% terjadi penurunan sebesar 8,00%. Pada tahun 2015 sebesar 77,91% terjadi kenaikan sebesar 3,25%.

Berdasarkan analisis *varians* secara umum kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila realisasi belanjanya tidak melebihi yang dianggarkan, namun sebaliknya jika realisasi belanja besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan bahwa adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa jumlah realisasi belanja Pemerintah Kota Padang Panjang lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2013-2015, maka kinerjanya dapat dikatakan baik. Jadi dengan kata lain untuk belanja Kota Padang Panjang paling besar berasal dari belanja operasi yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Dengan hasil dari belanja yang realisasinya lebih kecil dari yang telah dianggarkan maka pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan SILPA surplus (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

## b. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tht} - \text{Realisasi Belanja Tht-1}}{\text{Realisasi Belanja Tht-1}} \times 100\%$$

**Tabel 4.13**  
**Pertumbuhan Belanja**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>Belanja Daerah<br/>(Rp)</b> | <b>Pertumbuhan</b> |
|------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>2012</b>      | 349.829.174.811                | -                  |
| <b>2013</b>      | 393.183.728.547                | 12,40%             |
| <b>2014</b>      | 406.617.041.960                | 3,42%              |
| <b>2015</b>      | 491.459.794.814                | 20,87%             |
| <b>Rata-rata</b> |                                | <b>12,23%</b>      |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari perhitungan di atas, pada tahun 2013 persentase pertumbuhan belanja sebesar 12,40%, pada tahun 2014 sebesar 3,42% terjadi penurunan sebesar 8,98%. Sedangkan pada tahun 2015 persentase pertumbuhan belanja sebesar 20,87% terjadi peningkatan sebesar 17,45%. Dari analisis pertumbuhan belanja di atas, dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan belanja tertinggi berada pada tahun 2015 dan persentase pertumbuhan belanja terendah berada pada tahun 2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja daerah di Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2013-2015 mengalami penurunan dan kemudian mengalami peningkatan.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja dapat dikatakan baik, karena belanja daerah terus meningkat setiap tahunnya yang diimbangi dengan jumlah pendapatan. Ini terlihat dari aspek-aspek belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

### c. Analisis Keserasian Belanja

#### 1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4.14**

#### **Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>Realisasi<br/>Belanja Operasi<br/>(Rp)</b> | <b>Total Belanja<br/>Daerah<br/>(Rp)</b> | <b>Persentase<br/>Rasio</b> |
|------------------|---|--|-----------------------------|
| 2013             | 324.661.970.820                               | 393.183.728.547                          | 82,57%                      |
| 2014             | 341.904.376.514                               | 406.617.041.960                          | 84,08%                      |
| 2015             | 379.707.077.572                               | 491.459.794.814                          | 77,26%                      |
| <b>Rata-rata</b> |   |  | <b>81,30%</b>               |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari tabel perhitungan di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja operasi dari total belanja daerah pada tahun 2013 sebesar 82,57%, pada tahun 2014 sebesar 84,08% terjadi peningkatan sebesar 1,51%, dan pada tahun 2015 sebesar 77,26% terjadi penurunan sebesar 6,82%.

Standar pengukurannya berada pada skala 60-90%. Secara rata-rata belanja operasi terhadap total belanja daerah sebesar 81,30%, ini dikatakan bahwa belanja operasi sudah mencapai skala yang ditentukan.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa total belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang lebih besar dialokasikan untuk belanja operasi seperti: belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki standar pengukuran belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah.

#### 2) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4.15**  
**Belanja Modal terhadap Total Belanja**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>Realisasi Belanja Modal (Rp)</b> | <b>Total Belanja Daerah (Rp)</b> | <b>Persentase Rasio</b> |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2013             | 68.215.718.726                      | 393.183.728.547                  | 17,35%                  |
| 2014             | 64.712.665.446                      | 406.617.041.960                  | 15,91%                  |
| 2015             | 111.190.406.986                     | 491.459.794.814                  | 22,62%                  |
| <b>Rata-rata</b> |                                     |                                  | <b>18,63%</b>           |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari tabel perhitungan di atas dapat dilihat bahwa persentase belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2013 sebesar 17,35%, pada tahun 2014 sebesar 15,91% terjadi penurunan sebesar 1,44%, dan pada tahun 2015 sebesar 22,62% terjadi peningkatan sebesar 6,71%.

Standar pengukurannya berada pada skala 5-20%. Secara rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah sebesar 18,63%, ini dikatakan bahwa belanja modal sudah mencapai skala yang ditentukan.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa total belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang lebih kecil dialokasikan untuk belanja modal seperti: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, dan belanja aset tetap lainnya.

### **3) Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja**

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4.16**  
**Belanja Langsung terhadap Total Belanja**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>Realisasi Belanja Langsung (Rp)</b> | <b>Total Belanja Daerah (Rp)</b> | <b>Persentase Rasio</b> |
|------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| 2013             | 68.215.718.726                         | 393.183.728.547                  | 17,35%                  |
| 2014             | 64.712.665.446                         | 406.617.041.960                  | 15,91%                  |
| 2015             | 111.190.406.986                        | 491.459.794.814                  | 22,62%                  |
| <b>Rata-rata</b> |  |                                  | <b>18,63%</b>           |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari perhitungan di atas dapat terlihat bahwa dari tahun 2013-2015 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga rasio belanja langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung. Persentase belanja langsung terhadap total belanja pada tahun 2013 sebesar 17,35%, pada tahun 2014 sebesar 15,91% terjadi penurunan sebesar 1,44%, dan pada tahun 2015 sebesar 22,62% terjadi peningkatan sebesar 6,71%. Secara rata-rata persentase belanja langsung terhadap total belanja sebesar 18,63% tidak mencapai standar pengukuran yaitu antara 60-90%.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa total belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang lebih kecil dialokasikan untuk belanja langsung yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4.17**  
**Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)</b> | <b>Total Belanja Daerah (Rp)</b> | <b>Persentase Rasio</b> |
|------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| 2013             | 224.136.160.579                              | 393.183.728.547                  | 57,00%                  |
| 2014             | 219.705.446.824                              | 406.617.041.960                  | 54,03%                  |
| 2015             | 246.063.404.337                              | 491.459.794.814                  | 50,07%                  |
| <b>Rata-rata</b> |  |                                  | <b>53,70%</b>           |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari perhitungan di atas persentase belanja tidak langsung terhadap total belanja pada tahun 2013 sebesar 57,00%, pada tahun 2014 sebesar 54,03% terjadi penurunan sebesar 2,94% dan pada tahun 2015 sebesar 50,07%. Secara rata-rata persentase belanja tidak langsung terhadap total belanja sebesar 53,70% ini tidak mencapai standar pengukuran yaitu antara 60-90%, tetapi alokasi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah lebih besar dari belanja langsung.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa total belanja daerah lebih besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung seperti: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

**d. Rasio Efisiensi Belanja**

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 4.18**  
**Efisiensi Belanja**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

| <b>Tahun</b>     | <b>Realisasi Belanja (Rp)</b> | <b>Anggaran Belanja (Rp)</b> | <b>Rasio Efisiensi Belanja</b> |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2013             | 393.183.728.547               | 475.637.931.961              | 82,66%                         |
| 2014             | 406.617.041.960               | 544.621.698.906              | 74,66%                         |
| 2015             | 491.459.794.814               | 630.804.257.350              | 77,91%                         |
| <b>Rata-rata</b> |                               |                              | <b>78,41%</b>                  |

*Sumber: data sekunder yang diolah*

Dari perhitungan di atas rasio efisiensi belanja dari realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun 2013 sebesar 82,66%, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 74,66% terjadi penurunan sebesar 8,00%. Pada tahun 2015 sebesar 77,91% terjadi kenaikan sebesar 3,25%. Dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Padang Panjang dapat dikatakan efisien dalam melakukan realisasi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi dari tahun 2013-2015 berada dibawah 100% dengan rata-rata 78,41%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah Kota Padang Panjang adalah baik.

**Tabel 4.19**  
**Skala Interval Efisiensi**

| <b>Persentase</b> | <b>Kriteria</b>  |
|-------------------|------------------|
| Diatas 100%       | Tidak Efisiensi  |
| 90% - 100%        | Kurang Efisiensi |
| 80% - 90%         | Cukup Efisiensi  |
| 60% - 80%         | Efisiensi        |
| Dibawah 60%       | Sangat Efisiensi |

Analisis kinerja Perhitungan rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Kota Padang Panjang yang memakai perhitungan realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja, berarti pemerintah melakukan penghematan anggaran dari total anggaran yang dianggarkan itu juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi dengan hasil ini Pemerintah

Kota Padang Panjang kembali mendapatkan SILPA surplus (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari efisiensi belanja.

Berdasarkan beberapa analisis diatas menunjukkan bahwa analisis kinerja pengelolaan anggaran belanja Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2013-2015 sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis laksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

##### **1. Kinerja Keuangan Pendapatan**

Hasil Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien.

- a. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dilihat dari Varians Pendapatan Daerah selama Tahun 2013-2015, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang sebesar 100,26%.
- b. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dilihat dari Pertumbuhan Pendapatan Daerah selama Tahun 2013-2015, secara umum mengalami peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 27,48%.
- c. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Daerah selama tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Kota Padang Panjang dapat dikatakan rendah dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 11,36%. Dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama 2013-2015 menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang masih tergantung kepada pemerintah pusat ditunjukkan dengan angka kemandirian sebesar 13,00%. Tingkat efektifitas pendapatan asli daerah mencapai angka rata-rata 115,50% , sehingga dikatakan

sangat efektif. Rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah mencapai angka di atas 105,16%, sehingga dapat dikatakan sangat efektif.

## **2. Kinerja Keuangan Belanja**

Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2013-2015 sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.

- a. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dilihat dari Varians Belanja Daerah selama tahun 2013-2015, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar 78,41%.
- b. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah selama tahun 2013-2015, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 12,23%.
- c. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dilihat dari Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2013-2015 rata-rata Belanja Operasi sebesar 81,30% sedangkan Belanja Modal sebesar 18,63%. Dan total belanja daerah lebih kecil dialokasikan untuk belanja langsung dengan rata-rata sebesar 18,63%, sedangkan untuk belanja tidak langsung lebih besar dengan rata-rata 53,70%.

- d. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Padang Panjang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang kembali mendapatkan SILPA surplus (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari efisiensi belanja.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang
  - a. Pemerintah Kota Padang Panjang perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Kota Padang Panjang. Efisiensi akan meningkat jika Pemerintah Kota Padang Panjang dapat melaksanakan secara lebih optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki kontribusi kecil dalam PAD. Ada juga dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemerolehan PAD oleh yang bersangkutan.
  - b. Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah dalam Pemerintahan Kota Padang Panjang, maka dari itu Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menggali lebih lagi guna mencari beberapa potensi dari masyarakat maupun alam untuk meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana untuk Pemerintah Kota Padang Panjang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2013-2015. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini mengambil satu Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang Panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian pengelolaan keuangan daerah*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2007
- Bastian Bustami dan Nurlela, "*Akuntansi Biaya*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- I Dewa Gde Bisma dkk, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, (Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4 No. 3), 2010
- Ihyaul Ulum, *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2015
- Maftukhatusolikhah, *Mempertimbangkan Tingkat Maqasid asy-Syari'ah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah Evaluasi terhadap APBN 2008-2013*, (jurnal Intizar, Vol. 21 No. 1), 2015
- Mahmudi, "*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", Yogyakarta: STIM YKPN, 2007
- Mahmudi, "*Manajemen Kinerja Sektor Publik*", Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015
- Mardiasmo, "*Akuntansi Sektor Publik*", Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2009
- Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008
- Mulyadi, "*Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*", Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Nurul Huda dan Ahmad Muti, "*Keuangan Publik Islami*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Rizal Y. Budiman dkk, *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Tiga Daerah Pemekaran Di Provinsi Sulawesi Utara*, (Jurnal EMBA Vol.3 No. 1), 2015

*Standar Akuntansi Pemerintahan*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013

Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01

Umar Husein, *”Evaluasi Kinerja Perusahaan”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006

Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Rajawali Press, 2011

[www.padangpanjang.go.id](http://www.padangpanjang.go.id)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [data.p3m@gmail.com](mailto:data.p3m@gmail.com)

16 November 2016

Nomor : B-090 d- /ln.27/L.I/TL.00/ 11/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Rangkap  
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Walikota Padang Panjang  
Up. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang  
Padang Panjang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Miftahul Rizka / 12231009  
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Tuo, 02 September 1994  
Kartu Identitas : 1304014209940003  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan Sepuluh Koto  
Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Padang Panjang Periode 2013-2015**  
Lokasi : Kantor DPPKA Kota Padang Panjang  
Waktu : 17 November 2016 s.d 17 Januari 2017  
Dosen Pembimbing 1 : Gampito, SE., M.Si.  
Dosen Pembimbing 2 : Elfina Yenti, SE., M.Si., Akt., CA.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

an. Ketua  
Kepala Pusat Penelitian dan  
Penerbitan

Ika Metiza Maris, M. Si.  
NIP. 198205142006042003

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Sultan Syahrir No 150 Kolurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang  
Telp. ☎ (0752) 485395 Fax. ☎ (0752) 485395

**IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 320 / NP.KPPT - PP/ XI - 2016

Setelah mempelajari Surat an. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Batusangkar Nomor : B-090d/In.27/L./TL.00/11/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian dengan ini kami menyatakan tidak keoeratan atas maksud melaksanakan Penelitian/Permintaan Data di Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh :

Nama : **MIFTAHUL RIZKA**  
Tempat /Tanggal Lahir : Koto Tuo / 02 September 1994  
Alamat : Jorong Sawah Parik Panyalaian Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar  
No. Kartu Identitas : 1304014209940003 (KTP)  
No. Telepon /Hp : 085765912340  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Padang Panjang Periode 2013-2015  
Lokasi Penelitian : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang Panjang  
Lama Penelitian : 23 November 2016 s/d 23 Januari 2017 (2 Bulan)

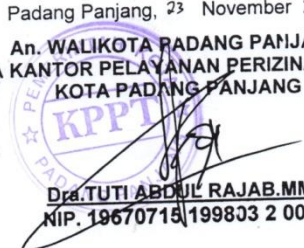
Dalam rangka mengadakan penelitian, peneliti diwajibkan/diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti harus melaporkan diri kepada pihak yang berwenang di tempat penelitian.
2. Penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat penelitian.
3. Peneliti diwajibkan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Padang Panjang melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
4. Peneliti dilarang melakukan penelitian di luar hal-hal yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang di tempat penelitian.
5. Apabila penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka izin penelitian ini dicabut kembali.

Demikianlah izin melaksanakan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 23 November 2016

An. **WALIKOTA PADANG PANJANG**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA PADANG PANJANG**

  
**Dra. TUTI ABDUL RAJAB.MM**  
**NIP. 19670715199803 2 001**

Tembusan Izin Melaksanakan Penelitian ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang;
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang Panjang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Batusangkar.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JL. SUTAN SYAHRIR No. 178 TELP. (0752) 485152 FAX. (0752) 485152  
PADANG PANJANG 27118

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/137/BPKD-PP/I/2017

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala BPKD Kota Padang Panjang dengan ini menerangkan bahwa :

|          |   |
|----------|---|
| Nama     | : MIFTAHUL RIZKA                            |
| NIM      | : 12 231 009                                |
| Jurusan  | : Akuntansi Syariah                         |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar |

Telah mengadakan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang dari tanggal 23 November 2016 s/d 23 Januari 2017.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG



INDRA GUSNADY, SE, M.Si  
NIP.19700804 199803 1 006




PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

| NO. | URAIAN   | ANGGARAN<br>2013           | REALISASI<br>2013         | %              | REALISASI<br>2012         |
|-----|--|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>  |                            |                           |                |                           |
| 2   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                              |                            |                           |                |                           |
| 3   | Hasil Pajak Daerah   | 4.078.500.000,00           | 4.060.955.402,00          | 99,57          | 3.514.177.859,00          |
| 4   | Hasil Retribusi Daerah                                     | 5.114.000.000,00           | 5.355.477.609,22          | 104,70         | 19.308.185.675,58         |
| 5   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan          | 4.121.243.121,00           | 4.259.913.723,00          | 103,36         | 4.101.829.156,00          |
| 6   | Lain-lain PAD yang Sah                                     | 24.513.500.000,00          | 27.837.141.507,51         | 113,36         | 5.496.414.609,70          |
| 7   | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>                       | <b>37.828.203.121,00</b>   | <b>41.513.488.241,83</b>  | <b>109,74</b>  | <b>32.420.607.300,28</b>  |
| 8   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                 |                            |                           |                |                           |
| 9   | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAN PERUBAHAN</b>           |                            |                           |                |                           |
| 10  | Dana Bagi Hasil Pajak                                      | 14.224.913.405,00          | 15.336.319.838,00         | 107,82         | 12.041.231.876,00         |
| 11  | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                           | 1.224.897.144,00           | 932.374.002,00            | 76,12          | 8.741.026.227,00          |
| 12  | Dana Alokasi Umum  | 302.846.549.000,00         | 302.846.549.000,00        | 100,00         | 209.610.492.000,00        |
| 13  | Dana Alokasi Khusus  | 22.732.000.000,00          | 13.049.495.000,00         | 57,50          | 18.629.610.000,00         |
| 14  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>         | <b>374.027.619.629,00</b>  | <b>336.164.737.840,00</b> | <b>98,57</b>   | <b>309.022.360.103,00</b> |
| 15  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>                 |                            |                           |                |                           |
| 16  | Dana Penyesuaian   | 28.620.181.000,00          | 28.620.181.000,00         | 100,00         | 22.296.642.000,00         |
| 17  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b> | <b>28.620.181.000,00</b>   | <b>28.620.181.000,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>22.296.642.000,00</b>  |
| 18  | <b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>                        |                            |                           |                |                           |
| 19  | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                | 9.298.694.000,00           | 9.624.080.000,00          | 103,52         | 9.149.168.000,00          |
| 20  | <b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>      | <b>9.298.694.000,00</b>    | <b>9.624.080.000,00</b>   | <b>103,52</b>  | <b>9.149.168.000,00</b>   |
| 21  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                       |                            |                           |                |                           |
| 22  | Pendapatan Hibah   | 1.092.631.000,00           | 1.092.631.000,00          | 100,00         | -                         |
| 23  | Pendapatan Fungsional                                      | 1.092.631.000,00           | 1.092.631.000,00          | 100,00         | -                         |
| 24  | Bantuan Keuangan dari Propinsi Lainnya                     | 1.092.631.000,00           | 1.092.631.000,00          | 100,00         | -                         |
| 25  | <b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>                | <b>1.092.631.000,00</b>    | <b>1.092.631.000,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>-</b>                  |
| 26  | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                   | <b>418.967.239.360,00</b>  | <b>417.015.118.681,83</b> | <b>99,75</b>   | <b>372.888.777.403,28</b> |
| 27  | <b>BELANJA</b>   |                            |                           |                |                           |
| 28  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                     |                            |                           |                |                           |
| 29  | Belanja Pegawai  | 243.211.691.231,00         | 224.136.160.579,00        | 92,16          | 204.249.169.968,00        |
| 30  | Belanja Barang dan Jasa                                    | 107.796.125.409,00         | 90.089.890.242,30         | 83,57          | 81.315.223.119,00         |
| 31  | Biaya  | -                          | -                         | -              | -                         |
| 32  | Subsidi  | -                          | -                         | -              | -                         |
| 33  | Hibah  | 15.163.000.000,00          | 9.017.659.356,00          | 59,51          | 12.022.521.290,00         |
| 34  | Bantuan Sosial   | 4.149.400.000,00           | 908.619.500,00            | 21,90          | 2.164.477.000,00          |
| 35  | Bantuan Keuangan   | 500.000.000,00             | 449.641.143,68            | 89,93          | 499.641.143,68            |
| 36  | <b>Jumlah Belanja Operasi</b>                              | <b>368.820.126.640,00</b>  | <b>324.661.970.820,98</b> | <b>88,03</b>   | <b>300.251.032.520,68</b> |
| 37  | <b>BELANJA MODAL</b>                                       |                            |                           |                |                           |
| 38  | Belanja Tanah  | 5.833.420.000,00           | 1.893.979.016,00          | 32,47          | 79.500.000,00             |
| 39  | Belanja Peralatan dan Mesin                                | 23.351.777.800,00          | 12.468.275.662,00         | 53,40          | 15.366.681.421,00         |
| 40  | Belanja Gedung dan Bangunan                                | 29.885.488.900,00          | 22.685.784.685,38         | 75,98          | 11.093.747.522,00         |
| 41  | Belanja Jalan, Irrigasi dan Jaringan                       | 34.378.831.000,00          | 31.661.128.850,00         | 92,09          | 20.209.345.782,00         |
| 42  | Belanja Aset Tetap Lainnya                                 | 205.700.000,00             | 196.550.513,00            | 95,59          | 362.574.503,00            |
| 43  | <b>Jumlah Belanja Modal</b>                                | <b>93.655.223.780,00</b>   | <b>68.215.718.726,38</b>  | <b>72,84</b>   | <b>47.111.849.228,00</b>  |
| 44  | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                 |                            |                           |                |                           |
| 45  | Belanja Tak Terduga  | 13.162.581.541,17          | 306.039.000,00            | 2,33           | 2.466.293.063,00          |
| 46  | <b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>                          | <b>13.162.581.541,17</b>   | <b>306.039.000,00</b>     | <b>2,33</b>    | <b>2.466.293.063,00</b>   |
| 47  | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                      | <b>475.637.931.961,17</b>  | <b>393.183.728.547,36</b> | <b>82,66</b>   | <b>349.829.174.811,68</b> |
| 48  | <b>TRANSFER</b>  |                            |                           |                |                           |
| 49  | <b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>                         |                            |                           |                |                           |
| 50  | Bagi Hasil Pajak   | -                          | -                         | -              | -                         |
| 51  | <b>JUMLAH TRANSFER</b>                                     | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>       | <b>-</b>                  |
| 52  | <b>SURPLUS (DEFISIT)</b>                                   | <b>(57.670.692.601,17)</b> | <b>23.831.390.134,47</b>  | <b>-41,40%</b> | <b>23.059.602.591,60</b>  |

| NO. | URAIAN                                 | ANGGARAN<br>2013  | REALISASI<br>2013 | %      | REALISASI<br>2012 |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 64  |  |                   |                   |        |                   |
| 65  | <b>PEMBAYARAN</b>                      |                   |                   |        |                   |
| 66  | <b>PENERIMAAN PEMBAYARAN</b>           |                   |                   |        |                   |
| 67  | SILPA Tahun Lalu                       |                   |                   |        |                   |
| 68  | Penerimaan lainnya                     | 67.577.692.601,17 | 67.577.692.601,17 | 100,00 | 53.218.090.009,57 |
| 69  | Jumlah Penerimaan                      | 67.577.692.601,17 | 67.577.692.601,17 | 100,00 | 53.218.090.009,57 |
| 70  |  |                   |                   |        |                   |
| 71  | <b>PENGELUARAN PEMBAYARAN</b>          |                   |                   |        |                   |
| 72  | Pembiayaan Modal Pemerintah Daerah     |                   |                   |        |                   |
| 73  | Pengeluaran lainnya                    | 10.007.000.000,00 | 10.007.000.000,00 | 100,00 | 8.700.000.000,00  |
| 74  | Jumlah Pengeluaran                     | 10.007.000.000,00 | 10.007.000.000,00 | 100,00 | 8.700.000.000,00  |
| 75  |  |                   |                   |        |                   |
| 76  | <b>PEMBAYARAN NETTO</b>                |                   |                   |        |                   |
| 77  |  | 57.570.692.601,17 | 57.570.692.601,17 | 100,00 | 44.518.090.009,57 |
| 78  | Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) |                   | 81.402.082.735,64 |        | 67.577.692.601,17 |

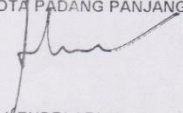


  
**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

| URAIAN   | ANGGARAN<br>2014           | REALISASI<br>2014         | %               | REALISASI<br>2013         |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>I PENDAPATAN</b>                              |                            |                           |                 |                           |
| <b>A PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                  |                            |                           |                 |                           |
| Hasi Pajak Daerah                                | 5,051,000,000.00           | 5,386,058,175.00          | 106.67          | 4,060,955,402.00          |
| Hasi Retribusi Daerah                            | 4,307,560,000.00           | 4,802,131,527.34          | 106.84          | 3,355,477,609.22          |
| Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diusahakan | 4,495,824,848.00           | 4,453,824,848.00          | 99.07           | 4,259,913,723.00          |
| Lain-lain PAD yang Syah                          | 32,869,948,300.00          | 37,085,078,120.96         | 112.82          | 27,837,141,507.61         |
| <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>             | <b>46,724,333,148.00</b>   | <b>51,529,092,671.33</b>  | <b>110.28</b>   | <b>41,513,488,241.83</b>  |
| <b>B PENDAPATAN TRANSFER</b>                     |                            |                           |                 |                           |
| <b>1. PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>    |                            |                           |                 |                           |
| Bagi Hasil Pajak                                 | 10,223,135,980.00          | 11,000,276,723.00         | 107.60          | 15,336,319,636.00         |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                 | 2,745,093,870.00           | 2,114,897,383.00          | 76.96           | 932,374,002.00            |
| Dana Alokasi Umum                                | 341,743,153,000.00         | 341,743,153,000.00        | 100.00          | 302,846,546,000.00        |
| Dana Alokasi Khusus                              | 31,639,720,000.00          | 23,675,790,000.00         | 75.00           | 17,049,495,000.00         |
| Dana SOS-TP Guru                                 | 0.00                       | -                         | -               | -                         |
| <b>Sub Jumlah</b>                                | <b>386,554,096,950.00</b>  | <b>378,738,216,086.00</b> | <b>97.98</b>    | <b>336,164,737,840.00</b> |
| <b>2. PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>               |                            |                           |                 |                           |
| Dana Penyesuaian                                 | 30,186,585,000.00          | 30,186,585,000.00         | 100.00          | 28,620,181,000.00         |
| <b>Sub Jumlah</b>                                | <b>30,186,585,000.00</b>   | <b>30,186,585,000.00</b>  | <b>100.00</b>   | <b>28,620,181,000.00</b>  |
| <b>3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah</b>   |                            |                           |                 |                           |
| Pendapatan Hibah                                 | -                          | -                         | -               | -                         |
| Dana darurat                                     | -                          | -                         | -               | -                         |
| Dana Bagi Hasil Pajak dan Propp/Permda Lainnya   | 13,595,551,073.00          | 13,595,551,073.00         | 100.00          | 9,624,080,000.00          |
| Dana Penyesuaian dan Cukonom Khusus (DIPP)       | -                          | -                         | -               | 0.00                      |
| Bantuan Keuangan dari Propp/Permda Lainnya       | 1,159,050,000.00           | 1,159,050,000.00          | 100.00          | 1,092,631,600.00          |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah            | -                          | -                         | -               | 0.00                      |
| <b>Sub Jumlah</b>                                | <b>14,754,601,073.00</b>   | <b>14,754,601,073.00</b>  | <b>100.00</b>   | <b>10,716,711,600.00</b>  |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                         | <b>478,219,616,171.00</b>  | <b>475,208,494,830.33</b> | <b>99.37</b>    | <b>417,015,118,891.83</b> |
| <b>II BELANJA DAERAH</b>                         |                            |                           |                 |                           |
| <b>A BELANJA OPERASI</b>                         |                            |                           |                 |                           |
| Belanja Pegawai                                  | 247,550,682,571.00         | 219,705,446,624.00        | 88.75           | 224,136,160,679.00        |
| Belanja Barang dan Jasa                          | 150,161,931,525.00         | 116,565,182,850.00        | 77.63           | 80,089,890,242.30         |
| Ribung   | 0.00                       | -                         | -               | 0.00                      |
| Siswani  | 0.00                       | -                         | -               | 0.00                      |
| Hibah  | 7,733,000,000.00           | 4,069,163,128.00          | 52.62           | 9,017,859,356.00          |
| Bantuan Sosial                                   | 1,398,030,000.00           | 1,071,830,000.00          | 76.67           | 968,619,500.00            |
| Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota                    | 500,000,000.00             | 492,753,712.00            | 96.55           | 449,641,143.98            |
| <b>Jumlah Belanja Operasi</b>                    | <b>407,343,644,096.00</b>  | <b>341,904,376,514.00</b> | <b>83.94</b>    | <b>324,661,970,820.98</b> |
| <b>B BELANJA MODAL</b>                           |                            |                           |                 |                           |
| Belanja Tanah                                    | 41,656,981,777.00          | 9,495,400,000.00          | 15.59           | 1,803,979,016.00          |
| Belanja Peralatan dan Mesin                      | 30,746,338,500.00          | 17,268,647,428.00         | 56.17           | 12,458,275,662.00         |
| Belanja Gedung dan Bangunan                      | 32,954,285,810.00          | 15,176,364,950.00         | 46.05           | 22,085,784,685.98         |
| Belanja Jalan, Infrast dan Janingan              | 28,550,069,323.00          | 24,702,982,979.00         | 86.53           | 31,061,128,850.00         |
| Belanja Aset Tetap Lainnya                       | 2,365,670,000.00           | 1,069,070,089.00          | 45.19           | 196,550,513.00            |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b>                      | <b>136,273,345,410.00</b>  | <b>64,712,665,446.00</b>  | <b>47.49</b>    | <b>68,215,718,726.38</b>  |
| <b>C BELANJA TAK TERDUGA</b>                     |                            |                           |                 |                           |
| Belanja Tak Terduga                              | 1,004,709,400.64           | -                         | -               | 306,039,000.00            |
| <b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>                | <b>1,004,709,400.64</b>    | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>306,039,000.00</b>     |
| <b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>                     | <b>544,621,698,906.64</b>  | <b>406,617,041,960.00</b> | <b>74.66</b>    | <b>393,183,728,547.36</b> |
| <b>III TRANSFER</b>                              |                            |                           |                 |                           |
| Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa        | -                          | -                         | -               | -                         |
| <b>Jumlah Transfer</b>                           | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>                  |
| <b>JUMLAH BELANJA DAERAH DAN TRANSFER</b>        | <b>544,621,698,906.64</b>  | <b>406,617,041,960.00</b> | <b>74.66</b>    | <b>393,183,728,547.36</b> |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                         | <b>(66,402,082,735.54)</b> | <b>68,591,452,870.33</b>  | <b>(103.30)</b> | <b>23,831,390,134.47</b>  |

| URAIAN                                  | ANGGARAN<br>2014  | REALISASI<br>2014  | %      | REALISASI<br>2013 |
|---|-------------------|--------------------|--------|-------------------|
| IV PEMBIAYAAN                           |                   |                    |        |                   |
| A PENERIMAAN PEMBIAYAAN                 |                   |                    |        |                   |
| SiLPA Tahun Lalu                        | 81.402.082,735.64 | 81.402.082,735.64  | 100,00 | 87.577.692,601.17 |
| Penerimaan dana titipan                 | 0,00              | 0,00               | -      | 0,00              |
| Penerimaan lainnya (koreksi tahun lalu) | 0,00              | 0,00               | -      | -                 |
| Jumlah Penerimaan                       | 81.402.082,735.64 | 81.402.082,735.64  | 100,00 | 87.577.692,601.17 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN                  |                   |                    |        |                   |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah      | 15.000.000,000.00 | 0,00               | -      | 10.007.000,000.00 |
| Jumlah Pengeluaran                      | 15.000.000,000.00 | -                  | -      | 10.007.000,000.00 |
| PEMBIAYAAN NETTO                        | 66.402.082,735.64 | 81.402.082,735.64  | 122,59 | 87.570.692,601.17 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  | -                 | 148.993.535,605.97 |        | 81.402.082,735.64 |

WALIKOTA PADANG PANJANG

  
WENDRI ARNIS



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014

| URAIAN   | Ref             | ANGGARAN 2015             | REALISASI 2015            | %             | REALISASI 2014            |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>  |                 |                           |                           |               |                           |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                              |                 | <b>53.068.561.858,50</b>  | <b>67.035.654.310,81</b>  | <b>126,32</b> | <b>51.601.386.498,33</b>  |
| Pendapatan Pajak Daerah                                    | VI.1            | 5.066.736.000,00          | 5.566.826.451,00          | 109,24        | 5.388.058.175,00          |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                | VI.1.1.2        | 4.358.850.000,00          | 4.498.801.379,68          | 102,98        | 4.602.131.527,34          |
| Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan     | VI.1.1.3        | 5.780.330.252,00          | 5.760.138.840,00          | 99,65         | 4.453.824.849,00          |
| Lain-lain PAD yang Sah                                     | VI.1.1.4        | 37.842.842.606,50         | 51.229.887.840,13         | 135,38        | 37.157.371.947,99         |
| <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>                       |                 | <b>53.068.561.858,50</b>  | <b>67.035.654.310,81</b>  | <b>126,32</b> | <b>51.601.386.498,33</b>  |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                 | <b>VI.1.2</b>   | <b>444.469.866.059,00</b> | <b>438.134.381.579,00</b> | <b>98,57</b>  | <b>423.679.402.159,00</b> |
| <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>        |                 |                           |                           |               |                           |
| Dana Bagi Hasil Pajak                                      | VI.1.2.1        | 11.816.082.000,00         | 9.197.915.300,00          | 77,83         | 11.000.276.723,00         |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                           | VI.1.2.1        | 2.654.943.059,00          | 1.849.915.709,00          | 69,68         | 2.114.997.353,00          |
| Dana Alokasi Umum  | VI.1.2.1        | 343.008.704.000,00        | 343.008.704.000,00        | 100,00        | 341.743.153.000,00        |
| Dana Alokasi Khusus  | VI.1.2.1        | 33.922.520.000,00         | 27.138.016.000,00         | 80,00         | 23.879.790.000,00         |
| <b>Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b> |                 | <b>391.404.249.059,00</b> | <b>381.194.551.009,00</b> | <b>97,39</b>  | <b>376.738.216.065,00</b> |
| <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>                   | <b>VI.1.2.2</b> |                           |                           |               |                           |
| Dana Penyesuaian   | VI.1.2.2        | 37.681.329.000,00         | 37.681.329.000,00         | 100,00        | 30.166.585.000,00         |
| <b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>                  |                 | <b>37.681.329.000,00</b>  | <b>37.681.329.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>30.166.585.000,00</b>  |
| <b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>                  | <b>VI.1.2.3</b> |                           |                           |               |                           |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                | VI.1.2.3        | 15.384.288.000,00         | 16.656.001.570,00         | 108,27        | 13.595.551.073,00         |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                              | VI.1.2.3        | 0,00                      | 2.602.500.000,00          |               | 1.159.050.000,00          |
| <b>Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>           |                 | <b>15.384.288.000,00</b>  | <b>19.258.501.570,00</b>  | <b>125,16</b> | <b>14.754.601.073,00</b>  |
| <b>Total Pendapatan Transfer</b>                           |                 |                           | <b>438.134.381.579,00</b> |               |                           |
| <b>LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                       | <b>VI.1.3</b>   |                           |                           |               |                           |
| Pendapatan Hibah   |                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| Pendapatan Dana Darurat                                    |                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| Pendapatan Lainnya   |                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| <b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>                |                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                   |                 | <b>497.538.427.917,50</b> | <b>505.170.035.889,81</b> | <b>101,53</b> | <b>475.280.788.657,33</b> |
| <b>BELANJA</b>   | <b>VI.2</b>     |                           |                           |               |                           |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                                     | <b>VI.2.1</b>   |                           |                           |               |                           |
| Belanja Pegawai  | VI.2.1          | 289.780.719.095,00        | 246.063.404.337,00        | 84,92         | 219.705.446.824,00        |
| Belanja Barang / Jasa                                      | VI.2.1          | 158.589.821.068,00        | 126.694.742.340,00        | 81,15         | 116.565.182.850,00        |
| Hibah  | VI.2.1          | 7.208.166.000,00          | 4.948.930.895,00          | 68,66         | 4.069.163.128,00          |
| Bantuan Sosial   | VI.2.1          | 125.500.000,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.071.830.000,00          |
| Bantuan Keuangan Ipd Kab/Kota                              | VI.2.1          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 492.753.712,00            |
| <b>Jumlah Belanja Operasi</b>                              |                 | <b>455.684.206.163,00</b> | <b>379.707.077.572,00</b> | <b>83,33</b>  | <b>341.904.376.514,00</b> |



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

|  |        |                     |                    |        |                    |
|--|--------|---------------------|--------------------|--------|--------------------|
| BELANJA MODAL                          | VI.2.2 |                     |                    |        |                    |
| Belanja Tanah                          | VI.2.2 | 49.920.140.300,00   | 23.638.212.850,00  | 47,35  | 6.495.400.000,00   |
| Belanja Perawatan dan Mesh             | VI.2.2 | 34.621.630.503,00   | 25.349.388.905,00  | 73,22  | 17.266.847.428,00  |
| Belanja Gedung dan Bangunan            | VI.2.2 | 46.169.715.290,00   | 26.514.368.938,00  | 57,43  | 15.176.364.950,00  |
| Belanja Jalan, Ringas dan Jaringan     | VI.2.2 | 40.919.640.000,00   | 34.756.949.493,00  | 84,94  | 24.702.982.979,00  |
| Belanja Asst Telp Lainnya              | VI.2.2 | 1.345.072.000,00    | 928.466.800,00     | 69,10  | 1.069.070.089,00   |
| Jumlah Belanja Modal                   |        | 172.976.198.093,00  | 111.190.406.986,00 | 64,28  | 64.712.665.446,00  |
| BELANJA TAK TERDUGA                    | VI.1.3 |                     |                    |        |                    |
| Belanja Tak Terduga                    | VI.1.3 | 1.383.653.074,47    | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| Jumlah Belanja Tak Terduga             | VI.1.3 | 1.383.653.074,47    | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| JUMLAH BELANJA DAERAH                  |        | 630.044.257.350,47  | 490.897.484.558,00 | 77,91  | 406.617.041.960,00 |
| TRANSFER                               | VI.3   |                     |                    |        |                    |
| TRANSFER BANTUAN KEUANGAN              | VI.3   |                     |                    |        |                    |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya      | VI.3   | 760.000.000,00      | 562.310.256,00     | 73,99  | 0,00               |
| Jumlah Transfer                        |        | 760.000.000,00      | 562.310.256,00     | 73,99  | 0,00               |
| JUMLAH BELANJA DAERAH DAN TRANSFER     |        | 630.804.257.350,47  | 491.459.794.814,00 | 77,91  |                    |
| SURPLUS/(DEFISIT)                      | VI.4   | -133.265.829.432,97 | 13.710.241.075,61  | -10,29 | 68.663.746.697,33  |
| PEMBIAYAAN                             | VI.5   |                     |                    |        |                    |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                  | VI.5.1 |                     |                    |        |                    |
| Penggunaan SILPA Tahun sebelumnya      | VI.5.1 | 150.065.829.432,97  | 150.065.829.432,97 | 100,00 | 81.402.082.735,64  |
| Jumlah Penerimaan                      |        | 150.065.829.432,97  | 150.065.829.432,97 | 100,00 | 81.402.082.735,64  |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN                 | VI.5.2 |                     |                    |        |                    |
| Penyerahan Modal Pemerintah Daerah     | VI.5.2 | 16.800.000.000,00   | 15.800.000.000,00  | 94,05  | 0,00               |
| Jumlah Pengeluaran                     |        | 16.800.000.000,00   | 15.800.000.000,00  | 94,05  | 0,00               |
| PEMBIAYAAN NETTO                       |        | 133.265.829.432,97  | 134.265.829.432,97 | 100,75 | 81.402.082.735,64  |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | VI.5.3 | 0,00                | 147.976.070.508,78 |        | 150.065.829.432,97 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

WALIKOTA PADANG PANJANG

  
HENDRI ARNIS